

BAB 4

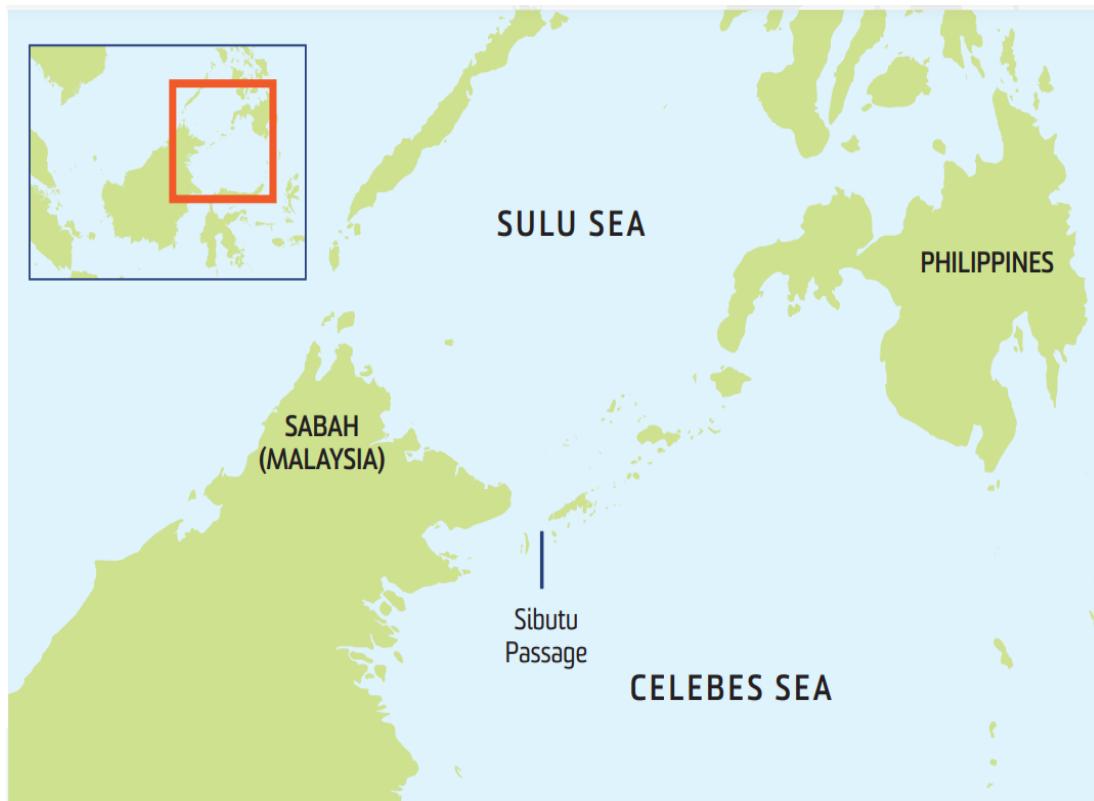
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1. Letak Geografis Laut Sulu-Sulawesi

Laut Sulu-Sulawesi merupakan sebuah perairan besar yang terletak di bagian timur Asia Tenggara yang terdiri dari Laut Sulu dan Sulawesi. Laut Sulawesi secara langsung bersambungan dengan Laut Sulu, hanya terpisah oleh pulau-pulau kecil yang diantaranya terdapat celah-celah perairan. Kedua laut ini terletak di puncak Segitiga Terumbu karang Dunia yang mengiris tiga negara yaitu Indonesia, Filipina, dan Malaysia (Rustam, 2017, p. 6). Laut Sulu-Sulawesi ini melewati Alur Laut Kepulauan Indonesia II atau ALKI II yang merupakan sebuah garis rute yang disediakan oleh Indonesia untuk lalu lintas kapal-kapal internasional. Peta lokasi Laut Sulu-Sulawesi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1.
Peta Lokasi Laut Sulu-Sulawesi



Sumber: Guidance on Abduction of Crew in the Sulu-Celebes Seas and Waters off Eastern Sabah ReCAAP ISC 2019

Pada gambar 4.1. dapat dilihat bahwa posisi Laut Sulu-Sulawesi ini mengiris dan berbatasan langsung dengan tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Perairan Laut Sulu-Sulawesi ini merupakan titik temu tiga garis (*trijunction*) batas maritime tiga negara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Laut Sulu terletak di barat daya Filipina yang dipisahkan dari Laut Cina Selatan di barat laut oleh Palawan dan dari Laut Sulawesi di Tenggara oleh Kepulauan Sulu sementara Laut Sulawesi di barat Samudera Pasifik dibatasi oleh Kepulauan Sulu, Laut Sulu, dan Pulau

Mindano, Filipina di utara, di timur oleh rantai Kepulauan Sangihe, di selatan oleh Sulawesi, dan di barat oleh Kalimantan (P2K ITBU, 2021).

Laut Sulu-Sulawesi merupakan wilayah perairan yang memiliki nilai strategis. Laut Sulu-Sulawesi ini memiliki *track* pelayaran yang paling padat dan juga berbahaya setelah Selat Malaka. Laut Sulu-Sulawesi tidak hanya memiliki arti penting bagi ketiga negara yang beririsan langsung namun juga memiliki arti penting dalam pelayaran perdagangan global. Ribuan armada tanker minyak dan armada dagang melewati Laut Sulu-Sulawesi karena potensi, letak maupun kuantitas kegiatan laut padat pada *track* tersebut. Kapal-kapal niaga internasional yang menggunakan jalur ini biasanya membawa batu bara dan komoditas lainnya ke China, Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Setiap tahunnya lebih dari 100,000 kapal melewati Laut Sulu-Sulawesi membawa 55 juta metrik ton kargo dan 18 juta penumpang. Setiap tahunnya kargo yang lewat bernilai sekitar 40 miliar dollar, di antaranya 700-800 juta dollar berupa ekspor batu bara Indonesia ke Filipina (Roza, 2018, p. 3). Selain itu, bentang Laut Sulu-Sulawesi juga menjadi salah satu kawasan yang berperan penting dalam pengelolaan Segitiga Terumbu Karang Dunia yang menambah nilai perairan Laut Sulu-Sulawesi ini. Wilayah perairan ini sangat potensial untuk dilewati berbagai kapal lintas negara untuk aktivitas dagang dengan jumlah besar sehingga kemungkinan peluang untuk mendapatkan keuntungan melalui aktivitas perompakan sangat terbuka.

4.1.2. Situasi Keamanan Laut Sulu-Sulawesi

Laut Sulu-Sulawesi memiliki arti penting baik bagi Indonesia, Malaysia, dan Filipina sebagai tiga negara yang beririsan langsung dengan Laut Sulu-Sulawesi dan juga bagi dunia. Laut Sulu-Sulawesi ini terletak di posisi strategis dan memiliki arti penting dalam jalur perdagangan global. Namun hal tersebut menjadi faktor berbagai ancaman yang terjadi seperti masalah pelanggaran wilayah karena posisi yang tepat berbatasan dengan tiga

negara (Indonesia, Malaysia, dan Filipina), masalah penyelundupan senjata, perdagangan manusia, penangkapan ikan secara ilegal hingga masalah perompakan kapal dan penculikan awak kapal (*maritime piracy*) (Saraswati & Pinatih, 2020, p. 2). Berbagai keuntungan dan nilai strategis di Laut Sulu-Sulawesi ini juga menyebabkan berbagai ancaman di kawasan ini. Beberapa bentuk gangguan keamanan di Laut Sulu-Sulawesi yaitu kejahatan lintas negara atau kejahatan transnasional seperti perompakan bersenjata dan penculikan dengan meminta tebusan serta migrasi ilegal yang dapat menimbulkan masalah keamanan terutama bagi Indonesia, Malaysia, dan Filipina sebagai negara yang beririsan langsung dengan Laut Sulu-Sulawesi. Laut Sulu-Sulawesi telah menjadi perhatian karena terjadi peningkatan kapal niaga di wilayah perairan tersebut terutama pada tahun 2016. Kerawanan di Laut Sulu-Sulawesi kembali menempatkan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan paling berbahaya di dunia. Kondisi keamanan di kawasan ini mendorong ReCAAP ISC pada 21 September 2016 mengeluarkan pernyataan yang menyarankan agar seluruh kapal menghindari jalur tersebut (Roza, 2018, p. 2).

Perompakan dan penculikan awak kapal merupakan salah satu bentuk ancaman yang banyak terjadi di kawasan Laut Sulu-Sulawesi. Pembajakan dan perompakan bersenjata merupakan bentuk ancaman yang jika dilihat dari bentuk kejahatannya memiliki tipikal yang sama, yaitu kejahatan bersenjata yang ditujukan kepada sebuah kapal yang sedang dalam pelayaran atau terhadap sesuatu yang ada di atas kapal tersebut (Arifin, Ras, & Siswoyo, 2018, pp. 4-5). Serangan di kawasan Laut Sulu-Sulawesi ini melibatkan penculikan dan penyanderaan dengan meminta uang tebusan. Ancaman serangan bajak laut di Laut Sulu-Sulawesi menjadi sebuah persoalan yang serius. Ancaman perompakan jika tidak segera dikelola akan menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan dan negara, mengancam nyawa pelaut, dan melumpuhkan aliran perdagangan

global. Dalam aktivitas penculikan yang dilakukan di Laut Sulu-Sulawesi ini para pelaku seringkali memindahkan peserta ke pantai dimana para sander aini ditahan dalam jangka waktu yang lama di bawah paksaan yang ekstrem. Tawanan juga seringkali menjadi korban pelecehan dan hidup dalam ketakutan akan dibunuh oleh para pelaku penculikan (Saraswati & Pinatih, 2020, p. 3). Menurut Kasubdit Multilateral Ditkersihan Kemhan RI, kejahatan di Laut Sulu-Sulawesi lebih mengarah kepada penahanan awak kapal dengan meminta tebusan dan juga kejahatan *smuggling* seperti penjualan senjata untuk mendukung kelompok-kelompok teroris lintas negara (Syarifuddin, 2021)

Aksi perompakan di kawasan Laut Sulu-Sulawesi tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan *Abu Sayyaf Group* (ASG). Sebagian besar insiden yang terjadi di Laut Sulu-Sulawesi dilakukan oleh ASG yang merupakan sebuah kelompok ekstrimis Islam berbasis di Filipina Selatan (ReCAAP ISC, 2019, p. 25). Secara geografis, *Abu Sayyaf Group* ini sangat dekat dengan wilayah perbatasan yang dapat menimbulkan berbagai aksi terror yang menjangkau lintas negara. Kelompok ini dikenal memanfaatkan perahu jenis jungkong untuk memangsa *freeboard* rendah dan kapal yang bergerak lambat. ASG sejak awal tahun 2000-an telah melakukan beberapa kali penculikan wisatawan di resor Malaysia dan Filipina, serta menenggelamkan sebuah kapal ferry di Manila Bay pada Februari 2004 yang menyebabkan 116 orang meninggal dunia (Roza, 2018, p. 4). Kelompok ini melakukan berbagai kejahatan laut kepada siapapun yang dapat menjadi targetnya dengan menculik awak kapal dan meminta tebusan kepada keluarga korban, perusahaan kapal, ataupun negara. Aksi perompakan ini merupakan salah satu cara kelompok ini dalam mendanai kegiatannya. ASG memiliki jaringan yang kuat dengan basis di Indonesia dan Malaysia. Anggota kelompok ASG ini juga berjanji setia kepada Abu Bakar Baghdadi (ISIS). Aksi ASG di kawasan Laut Sulu-

Sulawesi dikhawatirkan akan memperbesar dan memperkuat kelompok ini sehingga menjadi ancaman besar bagi kawasan. Abu Sayyaf Group merupakan kelompok pemberontak di Filipina Selatan yang melakukan berbagai kejahatan transnasional untuk mendanai pemberontakannya (Syarifuddin, 2021).

Laut Sulu-Sulawesi merupakan rute kapal tongkang dari Indonesia ke Filipina Selatan yang biasanya bermuatan batubara maupun minyak. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya kesempatan bagi ASG melakukan tindakan pembajakan kapal dan penculikan di wilayah perairan Filipina. Tujuan akhir dari setiap aksi ASG di perairan Laut Sulu-Sulawesi bukan sebatas material muatan kapal atau perangkat kapal yang berada di atas kapal, namun dalam setiap aksinya ASG memiliki tujuan penyanderaan terhadap kru kapal yang diikuti permintaan tebusan terhadap pemilik kapal atau perusahaan yang mempekerjakan para kru (Arifin, Ras, & Siswoyo, 2018, p. 17). ASG ini melakukan aksi kejahatan di lautan tanpa memandang status kewarganegaraan korbannya. Pergerakan ASG mengalami berbagai pergeseran yaitu pada aksi-aksi penculikan untuk menuntut tebusan kepada negara atau perusahaan yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan dimensi ancaman semakin berkembang dengan dilakukan oleh aktor non-negara. Ancaman terhadap keamanan, stabilitas nasional, dan internasional akibat interaksi aktor-aktor negara dengan aktor-aktor non-negara semakin memperkeruh situasi di kawasan Laut Sulu-Sulawesi.

4.1.3. Kerja Sama Trilateral Aspek Darat Indomalphi

Ancaman keamanan di kawasan Laut Sulu-Sulawesi merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina sebagai tiga negara yang berbatasan langsung dengan kawasan Laut Sulu-Sulawesi. Ancaman di Laut Sulu-Sulawesi bersifat ancaman non tradisional sehingga dalam menghadapinya dapat dilakukan tindakan-

tindakan yang sifatnya lebih diplomatis. Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menjaga keamanan kawasan Laut Sulu-Sulawesi. Pada Mei 2016, Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah mengadakan serangkaian pertemuan tingkat tinggi dan mengeluarkan pernyataan bersama soal keamanan di Laut Sulu dalam kesepakatan yang disebut *Trilateral Cooperative Arrangement (TCA)* (BBC News, 2017) (Diakses 21 Juli 2021). TCA di Laut Sulu terdiri dari Patroli Laut Terkoordinasi (*Coordinated Sea Patrol*), Patroli Udara (*Air Patrol*), Pertukaran Informasi dan Intelijen (*Information and Intelligent Sharing*) dan Latihan Darat Bersama (*Land Exercise*). Keempat patroli tersebut merupakan kerja sama strategis yang merupakan suatu kesatuan sehingga tidak dapat dipisahkan perbagian atau fungsinya (Primayanti, Legionosuko, & Waluyo, 2020, p. 1). TCA ini pada awalnya dimotivasi oleh keinginan bersama dari ketiga negara untuk membahas dan mengambil langkah-langkah strategis dalam mengatasi ancaman asimetris, terutama perampokan dan penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok radikal Abu Sayyaf. Dalam hal ini, ketiga negara sepakat bahwa ancaman perompakan di laut, penyanderaan, dan kejahatan transnasional dapat menurunkan kepercayaan perdagangan, perniagaan, dan kepercayaan terhadap kawasan secara umum. Pada Juni 2017, ketiga negara secara resmi meluncurkan *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi*, yang kemudian pada Oktober 2017 dilengkapi dengan kesepakatan untuk melakukan *Trilateral Air Patrol* di laut Sulu-Sulawesi.

Seiring dengan perkembangan lingkungan strategis di kawasan, Menteri Pertahanan ketiga negara sepakat untuk memperluas kerja sama dalam bentuk Indomalphi Middle Land Exercise (Kemhan RI, 2019). Patroli laut dan udara telah dilaksanakan pada tahun 2016 dan tahun 2017 oleh ketiga negara. Namun belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai kerja sama aspek darat. Dalam JWG TCA ke-6, Indonesia mengusulkan adanya

latihan darat trilateral dan mendapatkan titik terang pada JWG ke 7 dimana ketiga Menteri Pertahanan sepakat untuk melaksanakan di akhir tahun 2018 hingga awal 2019 (Joanita, 2019, p. 79). Dalam Shang Ri-La Dialogue yang dilaksanakan di Singapura pada 2019, ketiga negara ini sepakat untuk menyelenggarakan Latihan Darat Bersama Indomalphi. Pada tahun 2019, akhirnya ketiga negara ini menandatangani kerja sama trilateral dalam Shang Ri-La Dialogue yang dilaksanakan di Singapura pada tahun 2019. Kerja sama ini diwujudkan dalam bentuk latihan darat bersama Indomalphi di Tarakan, Kalimantan Utara.

4.2. Hasil Pengumpulan Data

4.2.1. Kerja Sama Trilateral Aspek Darat Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam Mengatasi Perompakan di Laut Sulu-Sulawesi

Penelitian terkait kerja sama trilateral aspek darat Indonesia Malaysia Filipina ini peneliti lakukan dengan mewawancarai sejumlah informan yang memahami dan terlibat langsung dalam kerja sama trilateral ini meliputi Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Malaysia dan Filipina di Indonesia, serta pandangan dari akademisi dan pengamat pertahanan untuk melengkapi data penelitian tesis ini.

Kerja sama trilateral aspek darat menurut Kolonel (Inf) Kurniawan Firmuzi Syarifuddin, S.E, Kasubdit Multilateral Ditkersinhan Kemhan RI sebagai berikut:

Kerja sama aspek darat ini sebenarnya tidak tertulis di TCA, namun kerja samanya ada dalam bentuk Latihan Darat Bersama di Tarakan. Indonesia menginisiasi adanya latihan darat bersama ini untuk membangun rasa saling percaya antara ketiga negara ini. Latihan darat bersama ini memiliki pengaruh juga bagi pelaksanaan TCA dimana TCA berjalan ke arah yang lebih baik, dan dapat dilihat dari angka kejahatan yang semakin menurun. Latihan darat ini sifatnya lebih kepada inisiatif politis oleh Menteri Pertahanan. Untuk pelaksanaannya, saat ini baru dilaksanakan satu kali di tahun 2019, dan kita mengharapkan kerja sama ini berkelanjutan dengan adanya inisiatif dari Malaysia dan Filipina juga. Dasarnya yaitu upaya membangun CBM. Hasilnya tidak sebagus yang dipublikasi. Kriteria baik

itu banyak. Apa yang direncanakan Indonesia tidak sepenuhnya terlaksana dengan baik. Pada dasarnya latihan bersama terlaksana dengan baik dari awal hingga akhir. Namun belum sesuainya berkaitan dengan jumlah personil. Jumlah personil yang datang masih belum sesuai harapan. Lalu hasilnya juga belum dimana dalam latihan darat bersama ini diharapkan ketiga negara ini bisa lebih *gathering* dan melupakan perbedaan yang ada. Namun hingga saat ini belum tercapai (Wawancara, 26 November 2021)

Masih terkait dengan kerja sama trilateral Aspek Darat, Diplomat Ahli Muda Direktorat Asia Tenggara, Candra Wiguna Alisufi menyampaikan bahwa:

Untuk kerja sama trilateral dituangkan dalam TCA, namun untuk implementasinya lebih relevan dengan Kementerian Pertahanan. Kerja sama trilateral ini muncul untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di Laut Sulu Sulawesi. Kerja sama trilateral ini merupakan kerja sama yang dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada. Untuk detail pelaksanaan latihan darat ini akan lebih jelas dari Kemhan dan peran Kemlu terletak di koordinasinya. Terkait kendala untuk kerja sama sendiri menurut saya kerja sama dikembangkan tidak hanya untuk menyelesaikan masalah, namun juga untuk mencegah. Isu utama adalah untuk mengatasi ancaman, kerjasama yang sebaiknya ditekankan yaitu kerjasama intelijen untuk mencegah. Selain itu latihan darat bersama ini juga dapat membantu dalam memberikan *deterrence effect* bagi ketiga negara (Wawancara, 21 Desember 2021)

Selanjutnya praktisi dan akademisi bidang pertahanan Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Yoedhi Swastanto, M.B.A terkait kerja sama trilateral aspek darat menyampaikan bahwa:

Tiga negara telah menginisiasi TCA dan menjadi bagian sub keamanan Asia Tenggara. Indonesia menginisiasi adanya kerja sama trilateral di tiga baik darat, laut, maupun udara untuk melindungi kepentingan tiga negara dari ancaman ASG dan ancaman lainnya di Lau Sulu-Sulawesi. Yang sudah dilaksanakan yaitu aspek laut dan udara. Aspek darat baru sampai tahap latihan bersama, belum sampai tahap operasi. Seharusnya kerja sama ini sampai kepada tahap operasi (Wawancara, 22 Desember 2021)

Lebih lanjut Swastanto menyampaikan bahwa kerja sama ini masih terdapat beberapa kendala sebagai berikut:

Masalah terkait institusi yang bertanggungjawab. Ada perbedaan yang mendasar di sini. *Leading sector* di luar dilaksanakan oleh Bakamlanya karena koordinir darat laut dan udara. Sementara kita dilakukan langsung oleh TNI. Mereka tidak hanya darat, laut udara tapi juga dengan berbagai pihak lainnya dibawah satu organisasi. Sementara kita masih bermasalah sistem komandonya. Filipina juga sama dengan kita. Kedua yaitu bermasalah di aturan. Ada SOP satu dan lainnya yang belum sinkron. Contoh kita dengan Filipina ada perjanjian yang belum selesai terkait militer asing yang operasi di Filipina harus ikut aturan main filipina. Itu masalahnya. Dan kita harus menyetujui parlemen mereka sementara kita tidak. Ini menjadi masalah dalam memberikan aspek legalitas kerja sama. Ada perbedaan antara Filipina dan Indonesia. Sementara dengan Malaysia kita aman. Yang ketiga yaitu kemampuan dan batas kekuatan militer masing-masing negara. Malaysia dan Indo sudah lumayan tapi Filipina masih agak kurang. Aspek darat saat ini belum ada kerjasama secara fisik karena kendala-kendala itu. Alternatifnya sampai sekarang baru dilaksanakan latihan darat bersama. Hanya ada satu kesepakatan yaitu latihan darat di daerah yang paling memungkinkan seperti di Tarakan. Kerja sama darat ini masih sulit dilaksanakan. Tiga aspek ini bagian dari kerja sama trilateral. Darat masih belum bisa melaksanakan operasi bersama namun masih melaksanakan latihan darat bersama untuk memberikan efek deterrence bagi para kelompok teroris. Regulasi ini juga menghalangi aspek-aspek lainnya juga. Kita masih fokus pada patroli terkoordinasi, belum latihan bersama. Selain itu mungkin yang bisa dilakukan yaitu port visit. Payung hukum legalnya masih kurang kuat. Kerja sama darat akan sulit, belum ada operasi sesuai yang diharapkan tapi masih melalui latihan darat bersama dan intelijen tertutup (Wawancara, 21 Desember 2021)

Terkait kendala-kendala kerja sama aspek darat dalam bentuk latihan darat bersama Indomalphi, Kolonel (Inf) Kurniawan Firmuzi Syarifuddin, S.E, Kasubdit Multilateral Ditkersinhan Ditjen Strahan Kemhan RI menyampaikan sebagai berikut:

Salah satu kesulitannya yang pertama yaitu adanya gap khususnya antara Malaysia dan Filipina yang dilatarbelakangi oleh faktor sejarah. Hal ini menimbulkan permasalahan *trust* antara ketiga negara. Lalu juga terkendala jumlah personil yang masih belum sesuai harapan. Setelah Indonesia menyelenggarakan latihan darat yang pertama, diharapkan Malaysia dan Filipina memiliki inisiatif untuk menyelenggarakan latihan darat Indomalphi. Hingga saat ini belum ada pembahasan dan mungkin

kita bisa lihat di tahun 2023 ketika pandemi sudah mulai mereda (Wawancara, 26 November 2021)

Perihal kerja sama trilateral dan kendala-kendala yang ada selama ini, perwakilan bidang pertahanan Kedutaan Besar Malaysia Jakarta, Nor Izam bin Baharudin menyatakan bahwa:

KERJA sama yang paling terlihat selama ini yaitu kerja sama di laut dan juga udara. Sementara kalau darat masih belum terlalu terlihat. Namun kerja sama darat dalam bentuk latihan bersama ini jika dilakukan daripada ketiga negara akan sangat baik untuk menjalin komunikasi antara ketiga negara. Saat ini persoalan yang paling mendasar yaitu komunikasi dan trust. Kerja sama dapat dikatakan masih belum efektif karena kendala-kendala ini (Wawancara, 12 Januari 2022)

Terkait kerja sama trilateral dan kendala-kendala yang ada selama ini, atase pertahanan Kedutaan Besar Filipina Jakarta Kolonel Emmanuel A Canilla PA menyatakan bahwa:

Indonesia, Malaysia, dan Filipina secara rutin melakukan kerja sama trilateral. Kerja sama tersebut menyatukan ketiga negara untuk bersama-sama berpatroli di wilayah tersebut guna menekan beberapa insiden penculikan. Selama ini tidak ada kendala yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan (Wawancara Tertulis, 12 Februari 2022)

Sementara itu, pengamat pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, terkait kerja sama trilateral ini menyampaikan bahwa:

Jika untuk mengatasi ancaman, kerja sama trilateral atau semacamnya, kunci utamanya adalah kita harus mampu menganalisis kebutuhan kita disana. Kita butuh upaya yang seperti apa. Menurut saya yang sebaiknya dilakukan adalah meningkatkan kerja sama intelijen disini, namun informasi yang diberikan tentu saja tidak akan seutuhnya (Wawancara, 3 Desember 2021).

Selain itu, terkait kerja sama trilateral aspek darat terdapat data-data lainnya yang dikumpulkan melalui dokumentasi. Yang pertama Dokumen Pidato Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dalam 17th Asia Security Summit: The IISS Shang Ri-La Dialogue 2 Juni 2018. Yang dimaksud oleh Menteri Pertahanan dalam pidato ini yaitu dalam menghadapi tantangan saat

ini, Indonesia, Malaysia dan Filipina sudah mengambil tindakan dan bekerja sama dalam kerangka trilateral di Laut Sulu, meliputi patroli gabungan dan terkoordinasi di laut, udara, dan kerja sama ini akan meningkat hingga operasi darat bersama. Kemudian data dokumentasi yang diperoleh yaitu Buku *Our Eyes: Counter Terrorism Intelligence Network* oleh Menteri Pertahanan Indonesia Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu. Dalam buku ini Menteri Pertahanan menjelaskan mengenai waktu pelaksanaan latihan darat bersama Indomalphi sebagai komponen ketiga dari TCA dan kerja sama ini hadir untuk melengkapi kerja sama laut dan udara yang telah ada sebelumnya.

4.2.2. Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Kerja Sama Aspek Darat Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk Mengatasi Perompakan di Laut Sulu-Sulawesi

Terkait diplomasi pertahanan Indonesia dalam kerja sama trilateral aspek darat Indomalphi, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kedutaan Besar Malaysia, Akademisi, dan Pengamat Pertahanan. Berikut wawancara peneliti terkait diplomasi pertahanan dengan Kasubdit Multilateral Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Kolonel (Inf) Kurniawan Firmuzi Syarifuddin, S.E:

Keamanan suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, keamanan negara dipengaruhi oleh keamanan global dan regional. Kerja sama trilateral berangkat dari banyaknya nelayan Indonesia dan Malaysia yang ditawan oleh Abu Sayyaf Group. Pengaruhnya yaitu kepada keamanan Indonesia dan juga Malaysia yang mana kapalnya dikuras habis. Hal ini berkaitan dengan Regional Security Complex dimana ketiga negara tidak aman dengan adanya kejahatan ini. Malaysia merasa tidak aman jika ada aksi di kawasan Filipina Selatan, dan bagi Indonesia, masyarakat kita ditawan. Terkait dengan kepentingan nasional masing-masing disini (Wawancara, 26 November 2021)

Terkait *confidence building measure* yang merupakan salah satu bagian dari diplomasi pertahanan, Syarifuddin, Kasubdit Multilateral Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menyampaikan bahwa:

Latihan darat yang dilakukan gunanya untuk membangun CBM dan rasa saling percaya ketiga negara. Diharapkan terbentuklah CBM sehingga ketiga negara ini bisa saling terbuka dan saling membantu. Intinya DP adalah kita bisa berkawan. Latihan darat yang ada ini ya cocok dengan teori Pak Rodon. CBM dapat dikatakan sudah mulai terbangun. Filipina lebih terbuka soal masalah laut, itu sudah perubahan kepada ketiga negara meskipun ada Malaysia. Ketiga negara ini mau saling berbagi. Banyak masalah disitu namun mulai sudah berbagi. Tanda-tandanya bisa dilihat dari sana (Wawancara, 26 November 2021)

Terkait persoalan diplomasi pertahanan dalam kerja sama ini, Syarifuddin menyampaikan bahwa:

Permasalahan mendasar sebenarnya berkaitan dengan latar belakang sejarah antara Malaysia dan Filipina. Kesultanan Sulu masih menganggap Sabah dan Serawak merupakan bagian dari mereka. Inilah alasan kenapa sulit bagi Malaysia dan Filipina kurang bisa membawakan CBM mereka. Masih terdapat gap diantara kedua negara ini. Selain itu terkait komunikasi, komunikasi berjalan dengan baik, 20-21 Desember akan ada JWG TCA. Sejauh ini Indonesia bertindak sebagai mediator antara ketiga negara ini. Masih ada barrier antara Malaysia dan Filipina. Buktinya ketika ada persoalan dua negara ini tidak saling berinisiatif. Kerjasama ini juga berusaha meredam perbedaan. Ada JWG TCA dan juga ASEAN. Dalam JWG TCA Indonesia menjadi mediator. Namun masih ada kendala terkait komunikasi dimana sebaiknya Buka platform umum komunikasi, karena tiga negara ini bukan aliansi. Sulit jika pake platform masing-masing yang tidak menghubungi. Platform baru sifatnya umum biar langsung. Komunikasi sulit dilaksanakan *point to point* (Wawancara, 26 November 2021)

Lebih lanjut terkait *confidence building measure*, Syarifuddin menyampaikan bahwa:

Secara umum CBM dapat dikatakan berhasil jika dilihat dari jumlah tawanan dan senjata. Bagian daratnya juga lebih ke *port visit*, kunjungan. Belum 100% dimana masih ada penolakan-penolakan. Setiap JWG TCA sekalian *Port Visit*. Dilaksanakan sebanyak JWG TCA kecuali 2020 dan 2021. Lalu juga dapat dilihat dari kebijakan SOVFA. Kebijakan SOVFA

tetap ada namun Filipina menghormati inisiatif Indonesia, bukan berarti melonggarkan (Wawancara, 26 November 2021)

Pihak Direktorat Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengenai diplomasi pertahanan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina, Diplomat Ahli Muda Candra Wiguna Alisufi menyatakan bahwa:

Terkait dengan CBM jika kita fokus di keamanan dapat dikatakan efektif karena awalnya tinggi sekali, tapi sejak ada kerja sama jadi dapat ditekan. Concern kita yaitu kepentingan kita dan juga perlindungan warga negara, sehingga masih penting untuk meningkatkan komunikasi dan kerja sama intelijen. Diplomasi berjalan baik jika dilihat dari angka perompakan dan keadaan menjadi lebih terkendali (Wawancara, 21 Desember 2021)

Sementara terkait kendala-kendala diplomasi pertahanan dalam kerja sama ini, Alisufi menyampaikan bahwa:

Kerja sama ini juga tergantung kebutuhan dan perkembangan yang ada. Kerja sama tidak hanya untuk menyelesaikan masalah tapi juga untuk mencegah. Isu utama adalah untuk mengatasi ancaman, kerjasama yang sebaiknya ditekankan yaitu kerjasama intelijen. Meningkatkan komunikasi instansi terkait untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman dan juga perkembangan-perkembangan di kawasan sehingga tidak ada lagi kejadian lagi seperti perompakan dan *human trafficking*. Kerja sama aspek darat ini memberikan *deterrence effect* yang menunjukkan kesiapan ketiga negara dalam menghadapi ancaman, meskipun ancaman di laut dan yang dilakukan latihan darat. Penting ini untuk mengurangi ancaman. Ketiga negara ini memiliki pandangan yang sama karena disepakati ketiga Menhan secara policy, namun perlu dituangkan lagi dalam konteks teknisnya. Penting komitmen politis dari ketiga negara ini. Pertemuan TCA rutin sekali, selama pandemi ini sudah 3 kali (Wawancara, 21 Desember 2021)

Selain itu, terkait landasan-landasan dalam kerja sama ini, Alisufi menyatakan bahwa:

Dari Kemlu sendiri tidak ada kebijakan SOVFA, karena ini membutuhkan peran aktif berbagai pihak untuk mengatasi kejahatan transnasional. Sedang dibahas terkait SOP dan Guidelines agar sepakat dari ketiga pihak. Negosiasinya tergantung aturan nasional masing-masing negara. Prosesnya tidak bisa ditargetkan, bisa sebenarnya tapi tergantung sejauh mana kepentingan ketiga negara ini diakomodir dalam kerjasama ini.

Tantangannya di negosiasi. Tapi saya cukup optimis karena di JWG TCA rutin sekali (Wawancara, 21 Desember 2021)

Sementara terkait kapabilitas militer yang dimiliki oleh ketiga negara, Alisufi dari pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa:

Kapabilitas militer bisa dilihat di sumber terbuka. Tapi memang di Malaysia ada ESCOM di Malaysia dan kekuatan sumber daya di timur, dimana mereka concern terhadap wilayah timur. Kita juga punya base di Tarakan. Jika kita jadi pindah ibu kota akan lebih kuat lagi pengamanan di perairan timur kita (Wawancara, 21 Desember 2021)

Dalam hal ancaman di Laut Sulu-Sulawesi, Nor Izam bin Baharudin , perwakilan pertahanan Malaysia di Kedutaan Besar Malaysia Jakarta menyampaikan bahwa:

Ini akan berdampak pada banyak aspek. Yang pertama yaitu ekonomi dimana para wisatawan mencari kerja utama atau puncak kehidupan mereka. Jadi mereka mengganggu kestabilan keamanan. Jika berita ini diketahui orang-orang asing, akan berdampak pada ekonomi. Dan at the same time dia memberikan image yang tidak baik bagi kestabilan pemerintah, hal ini saja tidak bisa ditangani oleh Pemerintah. Image tidak baik ini akan diketahui oleh dunia. Keamanan masyarakat setempat dan masyarakat lokal juga kena, mereka jadi takut. Untuk Filipina kita bisa mengurangi resiko negaranya karena negaranya merupakan lokasi Abu Sayyaf, Malaysia kita bisa bantu aspek keamanan dan ekonomi. Indonesia pun memiliki banyak TKI di Sabah jadi ancaman ini berdampak kepada kita semua (Wawancara, 12 Januari 2022)

Selanjutnya masih berkaitan dengan diplomasi pertahanan, Izam menyampaikan bahwa:

Menurut saya masih belum efektif. Kita masih banyak persoalan komunikasi dan trust. Secara fisik kita sebaiknya banyak melakukan kunjungan kerja secara fisik, melakukan kunjungan kerja. Harusnya tidak terbatas. Dalam militer banyak hal-hal yang kita hitung sebagai hal yang confidential. Namun untuk operasi ini kita harus lebih terbuka. Apa saja sistem yang digunakan untuk operasi ini apa saja, bukan tujuannya macam-macam tapi kita bisa memenuhi apa yang tidak ada dari kita untuk operasi ini. kunci utamanya, kenal mengenali, komunikasi yang efisien dan cepat. Tidak perlu tunggu mencurigakan dulu. Saya pernah di MCC saya call tidak ada yang jawab. Pake telpon saja. Kita bukan berhadapan

dengan kriminal yang memiliki alat canggih. Mereka bergantung pada senjata lama, jadi kita tidak perlu takut disadap. Kalau Adapun, kemungkinan lebih tipis. Mereka butuh uang untuk survival dan senjata tapi bukan untuk membeli gadget canggih. Kendala utama kita di komunikasi dan keterbukaan. Dengan melakukan latihan bersama secara intensif, kita bisa meningkatkan confidence juga (Wawancara, 12 Januari 2022)

Selain itu terkait kapabilitas militer yang dimiliki oleh ketiga negara, Izam menyatakan bahwa

Dari aspek kapabilitas, setiap negara memiliki kapabilitas semua namun sesuai kondisi situasi semasa, masa kini. Malaysia sendiri banyak menambah aset. Seperti Filipina memiliki konflik yang lebih hebat, krn kriminalnya disana. Mungkin Indonesia agak kurang, karena tidak ada kejahatan dari filipin masuk ke Indonesia. Upaya sudah ada tapi mungkin tidak terlalu ditambah. Tapi jika modus operandi berubah ke arah Indonesia, mungkin Indonesia akan meningkatkan. Bergantung pada kondisi. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita bukan berhadapan dengan negara, kita berhadapan dengan non state actor. Lebih baik kemampuan kita tingkatkan untuk menangani persoalan ini. Malaysia sekarang lagi meningkatkan ke daerah perairan sana. Mereka sering menyamar seperti orang lokal. Tergantung pemerintah apakah TCA ini bisa berkembang kerjasamanya, seberapa serius kita? (Wawancara, 12 Januari 2022)

Terkait ancaman di Laut Sulu-Sulawesi, atase pertahanan Filipina, Kolonel Emmanuel A. Canilla PA menyampaikan bahwa:

Keberadaan unsur teroris dan pelanggar hukum di Laut Sulu-Sulawesi mengancam kehidupan nelayan dan masyarakat sekitar. Di antara kejahatan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf di Laut Sulu-Sulawesi antara lain perampokan bersenjata serta penculikan untuk uang tebusan dengan sasaran nelayan dan turis asing. (Wawancara Tertulis, 12 Februari 2022)

Selain itu, terkait stabilitas keamanan di Laut Sulu-Sulawesi, Canilla menyampaikan bahwa “Pembajakan di Laut Sulu-Sulawesi tidak hanya mengancam kehidupan masyarakat dan perdagangan, tetapi juga mempengaruhi keamanan nasional dan regional secara umum” (Wawancara Tertulis, 12 Februari 2022)

Mengenai *confidence bulding measure*, Canilla menyampaikan bahwa: "Hal ini sangat efektif dalam arti melalui latihan darat sangat meningkatkan rasa percaya diri dan mempererat hubungan antara ketiga negara tersebut, selain itu ketiga negara ini dapat menimba ilmu dengan berbagi *best practices*" (Wawancara Tertulis, 12 Februari 2022)

Terkait dengan kepentingan ketiga negara ini di Laut Sulu-Sulawesi, Canilla menyatakan bahwa: "Penandatanganan kerja sama trilateral yang berkelanjutan sangat penting untuk mempromosikan pemahaman dan meningkatkan kerja sama di antara ketiga negara, dengan tujuan bersama untuk mengatasi terorisme dan perompakan di Laut Sulu-Sulawesi" (Wawancara Tertulis, 12 Februari 2022)

Terkait dengan kebijakan-kebijakan dalam kerja sama trilateral ini, Canilla juga menyampaikan bahwa:

Penandatanganan kerja sama trilateral yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan meningkatkan *Terms of References* (TOR) sebagai dokumen hukum yang sesuai, dan menjadi dasar bagi tiga negara termasuk kebijakan SOVFA. Untuk Filipina, SOVFA membutuhkan persetujuan Kongres Filipina sebelum diimplementasikan. Setelah disahkan dan disetujui, ini akan menjadi dasar hukum kedua negara penerima dan memungkinkan kerja sama kedua lembaga pertahanan khususnya latihan dengan personel yang besar, peserta yang terlibat, dan peralatan yang akan digunakan untuk kerja sama di antara ketiga negara dengan tujuan bersama untuk mengatasi terorisme dan perompakan di Laut Sulu-Sulawesi (Wawancara Tertulis, 12 Februari 2022)

Terkait masalah keamanan di Laut Sulu-Sulawesi, pengamat pertahanan Ibu Connie Rahakundini Bakrie menyampaikan bahwa

Masalah di Laut Sulu-Sulawesi ini sangat berpengaruh bagi keamanan regional, sekarang apapun yang terjadi di satu dunia akan berpengaruh ke dunia lain, begitupun kawasan. Contohnya saja dalam kasus LCS dipengaruhi oleh negara-negara yang jauh. Atas nama ancaman. Ancaman ini berlandaskan Human Security Paradigm bagaimana manusia bebas dari rasa ketakutan. Namun ini ukurannya tidak tetap dan bergerak terus. Ini juga sama dengan di Laut Sulu-Sulawesi (Wawancara, 3 Desember 2021)

Selain itu, terhadap rasa kepercayaan antara ketiga negara, Bakrie menyampaikan bahwa: “Jangankan trilateral. Kita sendiri di ASEAN punya *trust issue*. ASEAN tidak mungkin mengeluarkan *communicate* satu suara. Ada perbedaan pendapat di ASEAN. ASEAN tidak bisa mengeluarkan satu isu bersama.” (Wawancara, 3 Desember 2021)

Terkait kapabilitas militer yang dimiliki oleh ketiga negara ini, Bakrie menyampaikan bahwa:

Kapabilitas militer harus mandiri. Selain anggaran, kita butuh *training, equipment*, personil, infrastruktur, doktrin, organisasi, logistik, dan sistem informasi. Ini semua mesti nyambung . Ancaman semakin berkembang, apakah sanggup tentara Indonesia dengan ancaman-ancaman ini. Penting bagi Indonesia untuk memanfaatkan posisi geopolitiknya untuk melakukan hubungan luar negeri. Untuk human security sendiri, siapa yang sanggup kecuali negara besar? Kita sekarang punya rumah tapi cuma mampu 1 satpam ketika butuh 10 satpam? Jadinya kelabakan (Wawancara, 3 Desember 2021)

Sementara itu, terkait dengan ancaman di Laut Sulu-Sulawesi, praktisi dan akademisi bidang pertahanan Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Yoedhi Swastanto, M.B.A menyampaikan bahwa:

Perompakan ini akan mempengaruhi ancaman nasional dan regional, Hal ini bukan murni untuk kepentingan bisnis mereka tetapi juga lebih banyak politiknya. Kewajiban bagi Indonesia untuk melindungi WNI nya. Ada beberapa hubungan antara ASG dengan Poso, dan juga posisinya di Filipina Selatan sehingga ada penyelundupan senjata. Terorisme ini ancaman keamanan bersama (Wawancara, 22 Desember 2021)

Terkait dengan persoalan diplomasi pertahanan ketiga negara ini, Swastanto menyampaikan bahwa:

Masalah institusi yang bertanggungjawab. Ada perbedaan yang mendasar di sini. Kedua yaitu bermasalah di aturan. Ada SOP satu dan lainnya yang belum sinkron. Contoh kita dengan Filipina ada perjanjian yang belum selesai terkait militer asing yang operasi di Filipina harus ikut aturan main filipina. Itu masalahnya. Dan kita harus menyetujui parlemen mereka sementara kita tidak. Ini menjadi masalah dalam memberikan aspek legalitas kerja sama. Ada perbedaan antara Filipina dan Indonesia.

Sementara dengan Malaysia kita aman. Yang ketiga yaitu kemampuan dan batas kekuatan militer masing-masing negara. Malaysia dan Indo sudah lumayan tapi Filipina masih agak kurang. Aspek darat saat ini belum ada kerjasama secara fisik karena kendala-kendala itu. Alternatifnya sampai sekarang baru dilaksanakan latihan darat bersama. Hanya ada satu kesepakatan yaitu latihan darat di daerah yang paling memungkinkan seperti di Tarakan. Kerja sama darat ini masih sulit dilaksanakan. Tiga aspek ini bagian dari kerja sama trilateral. Darat masih belum bisa melaksanakan operasi bersama namun masih melaksanakan latihan darat bersama untuk memberikan efek deterrence bagi para kelompok teroris. Regulasi ini juga menghalangi aspek-aspek lainnya juga. Kita masih fokus pada patroli terkoordinasi, belum latihan bersama. Selain itu mungkin yang bisa dilakukan yaitu port visit. Payung hukum legalnya masih kurang kuat. Kerja sama darat akan sulit, belum ada operasi sesuai yang diharapkan tapi masih melalui latihan darat bersama dan intelijen tertutup (Wawancara, 22 Desember 2021).

Swastanto juga menyampaikan pandangannya mengenai persoalan terkait komunikasi ketiga negara ini dalam kerja sama sebagai berikut:

Komunikasi beberapa kendala terkait fasilitas, belum berjalan dengan baik. Cukup intens sebenarnya komunikasinya namun sistem nya masih belum maksimal. Mungkin ada SOP sendiri sehingga mereka komunikasi. Kerja sama yang ada baru latihan bersama, namun belum ada operasi bersama. Belum sampai tingkatan operasi karena kita butuh persetujuan DPR dan juga terkait kebijakan Filipina (Wawancara, 22 Desember 2021)

Lebih lanjut mengenai persoalan kebijakan dalam kerja sama ini, Swastanto menyampaikan bahwa:

SOVFA ini menjadi permasalahan juga kan ya bagi kita. Menurut pandangan saya, ketika kita menghormati suatu negara, kita hormati aspek hukum mereka. Kita ikuti saja mereka mengatur, namun mereka harus mendapat persetujuan legislaif mereka dan diratifikasi SOVFA nya, namun kita tidak ada begitu. Itu yang jadi persoalan, menurut saya masing-masing menghargai. Kita menghargai hukum Filipina dan sebaliknya Filipina juga harus mengerti itu sehingga harus ada omongan. Filipina jangan terlalu menggunakan agenda politiknya dimana kita memiliki masalah keamanan bersama. Kebijakan SOVFA begitu jangan mempersulit dan menghambat operasi. Untuk melaksanakan latihan tidak perlu sampai SOVFA sebenarnya. Filipina kalau kesini kita tidak pernah menuntut. Harusnya ada perubahan kebijakan masing-masing negara. SOVFA penting namun jangan sampai menghambat kerja sama dan operasi. SOVFA harusnya

membantu, bukan menghalangi. Filipina harus berubah kebijakannya dan kita mengikuti norma hukum yang dimiliki. Filipina harus berubah kalau tidak akan sulit (Wawancara, 22 Desember 2021)

Kerja sama trilateral aspek darat ini juga dapat mempengaruhi confidence building measure yang dimiliki oleh ketiga negara. Hal ini sejalan dengan pernyataan Swastanto sebagai berikut: “Jika kita sudah latihan, kita tau kemampuan, tujuan, dan SOP, kita akan mudah saling percaya. Karena ini bukan kepentingan sendiri, berkaitan dengan kepentingan bersama. Kita sudah punya pandangan bersama. Selain CBM kita juga memiliki kapasitas militer mulai meningkat, khususnya di AD” (Wawancara, 22 Desember 2021).

Selain itu, terkait kapabilitas militer yang dimiliki oleh ketiga negara, Swastanto menyampaikan bahwa:

Kapabilitas militer tiap negara relatif karena tiap negara punya teknik-teknik sendiri. Masing-masing negara sudah punya namun kekuatannya seperti Filipina memiliki banyak persoalan lain, tidak hanya ASG tapi juga Marawi, komunis, dan lain-lain sehingga kapasitas militernya kurang maksimal dimana mereka memiliki banyak spot. Kita mungkin bisa membantu logistik dan kemampuan militer mereka namun operasi tempur disana kita akan susah. Jadi kita melakukan latihan bersama untuk meningkatkan CBM dan juga kapasitas militer kita. Selain itu kerjasama intelijen kita juga menjadi aspek penting. ASG punya kekuatan besar, sehingga yang harus kita kerahkan ada 3 kali ASG nya (Wawancara, 22 Desember 2021)

4.3. Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa data yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian dilakukan pengolahan lebih lanjut dengan melakukan kategorisasi secara sistematis

4.3.1. Kerja Sama Trilateral Aspek Darat Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam Mengatasi Perompakan di Laut Sulu-Sulawesi Trilateral

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, peneliti akan mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan menjadi dua kategori yaitu bentuk kerja sama trilateral Indomalphi aspek darat serta

pelaksanaan dan kendala kerja sama trilateral aspek darat Indomalphi yang akan peneliti jelaskan dalam sub-bab berikut:

4.3.1.1. Bentuk Kerja Sama Trilateral Indomalphi Aspek Darat

Kumpulan data yang terkait dengan kategori ini adalah jawaban yang diberikan informan terkait bentuk kerja sama trilateral aspek darat dan juga landasan-landasan munculnya kerja sama trilateral aspek darat ini. Peneliti menilai bahwa kejelasan bentuk kerja sama trilateral aspek darat Indomalphi menjadi landasan utama bagi para aktor yang terlibat untuk melaksanakan kerja sama ini. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari informan dapat dilihat bahwa pada dasarnya bentuk kerja sama trilateral aspek darat ini berbentuk latihan darat bersama yang dilaksanakan oleh ketiga negara. Latihan darat ini dilaksanakan pada tahun 2019 oleh ketiga negara dengan mengangkat tema “Interoperabilitas Satuan TNI dengan Satuan Angkatan Bersenjata Malaysia dan Filipina dalam Menghadapi kemungkinan Terjadinya Aksi Terorisme dan Kejahatan Lintas Negara Lainnya di Wilayah yang Berbatasan dengan Perairan Laut Sulu dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Keamanan Kawasan”.

Berdasarkan data yang telah peneliti kumpulkan, terdapat perbedaan dalam data yang berkaitan dengan posisi kerja sama trilateral aspek darat ini. Peneliti melakukan triangulasi teknik dan triangulasi sumber mengenai hal ini. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kasubdit Multilateral Ditkersin Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, kerja sama aspek darat memang ada namun tidak merupakan bagian dari TCA. Selain latihan darat bersama, bentuk kerja sama aspek darat menurut Kasubdit Multilateral Ditkersin Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yaitu *Port Visit* atau kunjungan pelabuhan. Di dalam Joint Declaration ketiga negara, juga tidak dibahas secara spesifik mengenai kerja sama aspek darat. Namun, Menteri Pertahanan Republik

Indonesia, Bapak Ryamizard Ryacudu dalam Dokumen Pidato Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dalam 17th Asia Security Summit: The IISS Shang Ri-La Dialogue 2 Juni 2018 dan dalam Buku *Our Eyes: Counter Terrorism Intelligence Network* oleh Menteri Pertahanan Indonesia Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu, beliau menyatakan bahwa kerja sama aspek darat yang dilaksanakan dalam bentuk latihan darat bersama Indomalphi merupakan komponen ketiga dari Trilateral Cooperative Arrangement untuk melengkapi kerja sama laut dan udara yang telah dilaksanakan sebelumnya. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan akademisi bidang pertahanan, Bapak Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Yoedhi Swastanto, M.B.A dimana kerja sama aspek darat merupakan bagian dari kerja sama trilateral. Terkait landasan kerja sama ini masih terdapat perbedaan pandangan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat sehingga dapat menimbulkan kebingungan mengenai bentuk-bentuk kerja sama apa saja yang terkait dengan kerja sama trilateral Indomalphi aspek darat.

4.3.1.2. Pelaksanaan dan Kendala dalam Kerja Sama Trilateral Aspek Darat Indomalphi

Data-data yang terkait dengan kategori ini merupakan jawaban-jawaban yang diberikan oleh informan terkait pelaksanaan kerja sama trilateral aspek darat dan juga kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama ini. Peneliti beranggapan bahwa uraian mengenai pelaksanaan kerja sama trilateral aspek darat Indomalphi ini dapat memberikan gambaran untuk pelaksanaan kerja sama aspek darat selanjutnya. Dalam penelitian ini, peneliti melihat bagaimana pelaksanaan latihan darat bersama yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina pada tahun 2019. Terkait pelaksanaan kerja sama trilateral aspek darat, sebagian besar informan menyampaikan bahwa latihan darat bersama telah dilaksanakan namun masih belum mencapai hasil yang

maksimal. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang terjadi dan masih terdapat banyak harapan bagi pelaksanaan kerja sama ini di masa depan. Terkait kendala-kendala dalam kerja sama ini, peneliti melakukan triangulasi sumber dan sebagian besar informan menyampaikan kendala-kendala yang terjadi berkaitan dengan rasa percaya yang dimiliki oleh ketiga negara sehingga mempengaruhi pelaksanaan dan juga aturan serta landasan kerja sama yang masih kurang jelas.

4.3.2. Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Kerja Sama Aspek Darat Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk Mengatasi Perompakan di Laut Sulu-Sulawesi

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, peneliti akan mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan menjadi 2 kategori yaitu *collective national interest and regional security complex* dan diplomasi pertahanan Indonesia dalam kerja sama trilateral aspek darat Indomalphi untuk mengatasi perompakan di Laut Sulu-Sulawesi yang pembagian kategorinya akan peneliti jelaskan dalam sub-bab berikut:

4.3.2.1. Collective National Interest Indomalphi and Regional Security Complex

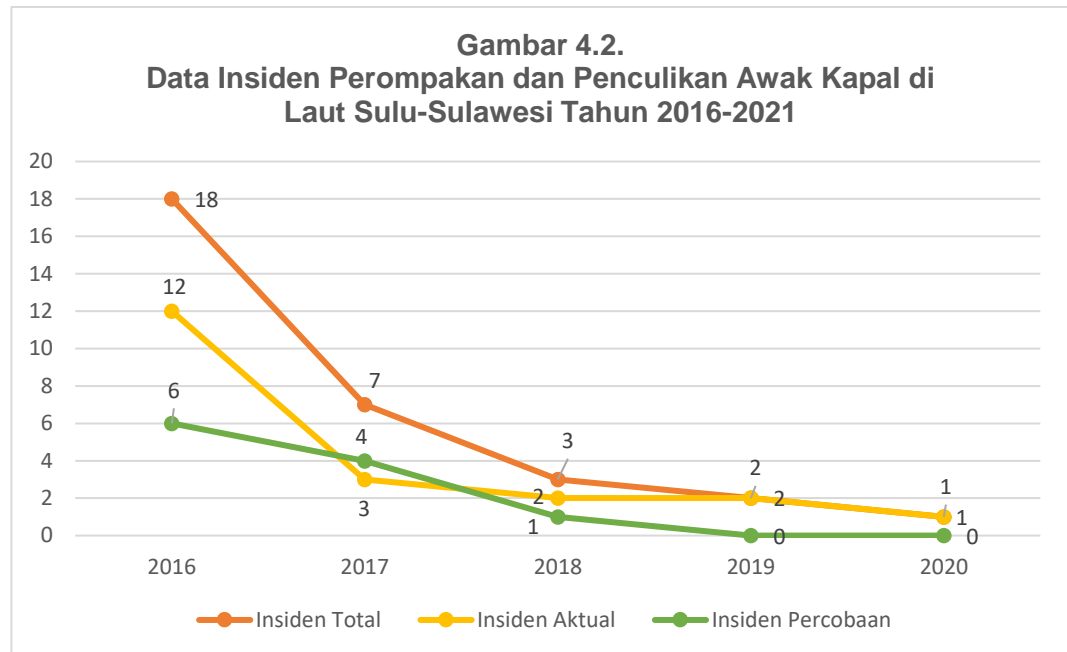
Data-data yang terkait dengan kategori ini merupakan jawaban-jawaban yang diberikan oleh informan terkait kepentingan nasional ketiga negara yang berkaitan dengan kawasan Laut Sulu-Sulawesi dan juga bagaimana kondisi keamanan di Laut Sulu-Sulawesi mempengaruhi stabilitas keamanan nasional dan regional. Berdasarkan data yang telah diperoleh, terkait *collective national interest* seluruh informan setuju bahwa dalam hal ini terdapat kepentingan bersama yang dibawa oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kejahatan lintas negara perompakan yang terjadi di kawasan Laut Sulu-Sulawesi merupakan sebuah kejahatan yang membahayakan kepentingan nasional ketiga negara.

Terkait keamanan regional, seluruh informan setuju bahwa kejahatan perompakan di Laut Sulu-Sulawesi juga memiliki kaitan erat dengan regional security complex dimana keamanan suatu negara tidak dapat berdiri sendiri dan akan dipengaruhi oleh keamanan lingkungan dan negara lainnya. Selain itu, ancaman kejahatan transnasional ini merupakan salah satu bentuk ancaman non-militer yang dilakukan oleh aktor non-negara. Dalam hal ini penting bagi ketiga negara untuk membangun kerja sama yang mampu mengakomodasi kepentingan nasional masing-masing negara dan juga kepentingan bersama yang dimiliki oleh ketiga negara.

4.3.2.2. Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Kerja Sama Trilateral Aspek Darat Indomalphi untuk Mengatasi Perompakan di Laut Sulu Sulawesi

Data-data yang terkait dengan kategori ini merupakan jawaban-jawaban yang diberikan oleh informan terkait pelaksanaan diplomasi pertahanan dalam rangka membangun *confidence building measure* dan kapabilitas militer yang dimiliki oleh ketiga negara untuk mengatasi perompakan di Laut Sulu-Sulawesi. Terkait *confidence building measure*, sebagian besar informan setuju bahwa masih terdapat persoalan-persoalan kepercayaan yang dimiliki oleh ketiga negara ini, sementara kondisi keamanan yang terjadi di Laut Sulu-Sulawesi ini menempatkan ketiga negara di dalam satu kepentingan yang sama. Perompakan ini menjadi ancaman yang serius di kawasan. Terkait kapabilitas militer yang dimiliki oleh ketiga negara, sebagian informan setuju bahwa kapabilitas militer yang dimiliki oleh ketiga negara untuk menghadapi ancaman di Laut Sulu-Sulawesi masih belum optimal dimana masih terdapat kekurangan kapabilitas militer karena banyaknya ancaman yang harus dihadapi oleh masing-masing negara.

Berdasarkan dokumen ReCAAP-ISC, peneliti akan fokus kepada data mengenai perompakan yang terjadi di Laut Sulu-Sulawesi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dan disusun dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Sumber : Situation Update January-July 2021 ReCAAP ISC

4.4. Interpretasi Data

4.4.1. Kerja Sama Aspek Darat Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam Mengatasi Perompakan di Laut Sulu-Sulawesi Trilateral

4.4.1.1. Bentuk Kerja Sama Trilateral Aspek Darat Indomalphi

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai landasan dan posisi kerja sama trilateral aspek darat. Ada data yang menyatakan bahwa kerja sama trilateral aspek darat ini bukan merupakan bagian dari Trilateral Cooperative Arrangement sementara ada data yang menyatakan bahwa aspek darat merupakan bagian dari Trilateral Cooperative Arrangement. Kasubdit Multilateral menyatakan bahwa kerja sama aspek darat ini merupakan salah satu bentuk inisiatif politik yang dimiliki oleh Menteri Pertahanan. Dapat dikatakan kerja sama aspek darat ini sudah ada namun masih belum memiliki landasan yang jelas. Hal ini

menyebabkan adanya pandangan yang berbeda-beda dari pihak yang terlibat.

Salah satu alasan terdapat perbedaan pandangan dan pemahaman ini yaitu karena ada beberapa kebijakan yang masih belum lengkap seperti belum adanya SOP dan *guidelines* yang jelas khususnya terkait kerja sama trilateral aspek darat. Dalam TCA ini, institusi yang bertanggungjawab masih belum jelas dan belum ada aturan main yang jelas sehingga pelaksanaan kerja sama ini menjadi belum optimal. Ketiga negara masih dalam proses penyusunan SOP dan *guidelines* namun masih dalam proses negosiasi.

Oleh karena itu penting penyusunan SOP dan *guidelines* kerja sama trilateral aspek darat serta pembagian tupoksi yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat sehingga setiap aktor yang terlibat memiliki pemahaman dan pandangan yang sama mengenai kerja sama trilateral aspek darat ini serta manfaatnya dalam rangka mengatasi perompakan di Laut Sulu Sulawesi. Model sosialisasi dan koordinasi yang tepat antar lembaga yang terlibat perlu dibangun untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama ini dalam mengatasi ancaman di kawasan Laut Sulu-Sulawesi. Bentuk dan landasan kerja sama yang jelas akan membantu ketiga negara mewujudkan keamanan di Laut Sulu-Sulawesi dari ancaman transnasional perompakan.

4.4.1.2. Pelaksanaan dan Kendala dalam Kerja Sama Trilateral Aspek Darat Indomalphi

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, latihan darat bersama telah dilaksanakan oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina pada 29 Juli hingga 8 Agustus 2019. Latihan darat bersama ini melibatkan 180 personil dan berlangsung selama 13 hari dengan materi Tembak Reaksi, Tembak Tepat, Pertempuran Jarak Dekat dengan Serbuan Permukiman, Patroli Keamanan, Penembakan Sniper, dan materi *Non Combatant Evacuation*. Latihan darat bersama ini telah dilaksanakan oleh ketiga negara dengan baik dari awal hingga akhir. Namun pelaksanaan kerja sama ini masih belum optimal jika

dilihat dari jumlah personil yang hadir dan juga dampak yang dari pelaksanaan kerja sama ini. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah personel yang dikirimkan oleh masing-masing negara untuk melakukan latihan bersama masih belum sesuai jumlahnya dengan yang diharapkan.

Selain itu, juga terdapat persoalan terkait institusi yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kerja sama yang masih kurang jelas dan juga aturan main atau SOP yang jelas. Operasi di Indonesia sendiri dilaksanakan oleh TNI langsung, bukan oleh beberapa aktor dalam satu organisasi atau institusi tertentu seperti yang dimiliki oleh negara lain. Kerja sama ini juga masih belum dilanjutkan hingga saat ini. Awalnya kerja sama ini diinisiasi oleh Indonesia dengan harapan akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Namun hingga saat penelitian dilaksanakan, belum ada pembicaraan lebih lanjut mengenai hal ini dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia akan menunggu inisiatif dari dua negara lain di masa yang akan datang. Harapannya kerja sama aspek darat ini yaitu terdapat operasi darat yang dimiliki oleh ketiga negara, namun hingga saat ini kerja sama masih dalam bentuk latihan darat bersama.

Aturan dan Standar Operasional Prosedur yang jelas tentu saja akan mendukung pelaksanaan kerja sama. Dengan demikian ke depannya ketiga negara bisa melakukan perencanaan pelaksanaan kerja sama trilateral aspek darat ke depannya, dengan standar-standar yang jelas seperti jumlah personel dan waktu pelaksanaan sehingga tidak ada lagi kendala-kendala yang bersifat teknis. Selain itu, dalam rangka pelaksanaan kerja sama trilateral aspek darat ini penting bagi ketiga negara untuk melakukan analisis kebutuhan sehingga kerja sama yang dilaksanakan menjadi tepat sasaran.

4.4.2. Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Kerja Sama Aspek Darat Indonesia Malaysia Filipina untuk Mengatasi Perompakan di Laut Sulu Sulawesi

4.4.2.1. Collective National Interest Indomalphi and Regional Security Complex

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, Indonesia, Malaysia dan Filipina merupakan tiga negara yang berbatasan langsung dengan kawasan Laut Sulu-Sulawesi dimana ketiga negara ini memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing. Namun kondisi keamanan di Laut Sulu-Sulawesi ini menempatkan ketiga negara dalam sebuah kepentingan bersama di luar kepentingan nasional mereka. Masalah keamanan di Laut Sulu-Sulawesi merupakan ancaman nirmiliter yang dilakukan oleh aktor non negara. Saat ini ketiga negara tidak berhadapan satu sama lain, ketiga negara butuh untuk bersatu dan bekerja sama untuk menghadapi ancaman dari aktor non negara ini. Dampak yang ditimbulkan dari gangguan keamanan di Laut Sulu-Sulawesi ini dapat mengganggu kepentingan nasional masing-masing negara. Selain persoalan ekonomi, banyak persoalan politik di dalam ancaman ini. Kejahatan lintas negara ini menjadi ancaman keamanan bersama bagi ketiga negara ini.

Selain itu, keamanan suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Keamanan suatu negara akan dipengaruhi oleh lingkungan strategisnya dan juga keamanan negara-negara di sekitarnya. Terkait ancaman perompakan di Laut Sulu-Sulawesi, ancaman ini mempengaruhi banyak aspek bagi ketiga negara ini yaitu pada aspek ekonomi dan bisnis, ancaman bagi stabilitas keamanan nasional dan regional, serta dapat memberikan pandangan yang buruk terhadap ketiga negara baik secara regional maupun global.

Penting bagi ketiga negara untuk menekankan kepentingan bersama dan juga stabilitas keamanan nasional, regional, dan global yang dipengaruhi oleh ancaman transnasional perompakan yang terjadi di kawasan Laut Sulu-

Sulawesi. Analisis kebutuhan dan *sharing information* menjadi landasan utama ketiga negara ini untuk menyusun strategi dalam rangka melindungi kepentingan nasional masing-masing dan juga kepentingan bersama di kawasan Laut Sulu-Sulawesi.

4.4.2.2. Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Kerja Sama Aspek Darat Indonesia Malaysia Filipina untuk Mengatasi Perompakan di Laut Sulu Sulawesi

Dalam menghadapi ancaman transnasional perompakan, ketiga negara memiliki beberapa persoalan terkait rasa percaya yang dimiliki oleh ketiga negara. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rasa saling curiga sehingga tidak ada keterbukaan antara ketiga negara ini, sementara ketiga negara ini memiliki kepentingan bersama di kawasan Laut Sulu-Sulawesi. Indonesia kurang yakin dengan operasi militer Filipina karena Abu Sayyaf terus eksis. Sementara itu Filipina menganggap Malaysia tidak proaktif karena militan Filipina punya jaringan dengan kelompok di utara Malaysia (BBC News, 2019). Persoalan kepercayaan yang dimiliki oleh ketiga negara ini dalam kerja sama trilateral dilatarbelakangi oleh faktor sejarah yang dimiliki oleh ketiga negara seperti persoalan batas wilayah antara Malaysia dan Filipina. Hal ini menyebabkan ketiga negara tidak terbuka satu sama lain dalam pelaksanaan kerja sama ini. Lalu terkait ketidakterbukaan kedaulatan ketiga negara ini juga disebabkan oleh adanya aturan *Status of Visiting Forces Arrangement* (SOVFA) yang dimiliki oleh Filipina. Penyusunan SOVFA ini juga memiliki beberapa kendala sehingga sulit untuk melaksanakan kerja sama aspek darat ini. Selain itu juga terdapat banyak persoalan-persoalan komunikasi yang dimiliki oleh ketiga negara ini.

Penelitian selanjutnya diarahkan untuk meningkatkan upaya diplomasi pertahanan yang dimiliki oleh ketiga negara sehingga ketiga negara tidak memiliki masalah-masalah kepercayaan dan tidak berhadapan satu sama lain melainkan menghadapi ancaman dari aktor non negara di kawasan Laut

Sulu-Sulawesi. Latihan darat bersama sudah menjadi sebuah awal yang baik bagi peningkatan kepercayaan ketiga negara namun dapat dilihat lebih lanjut dengan keberlanjutan kerja sama ini. Selain itu ketiga negara dapat mengembangkan berbagai bentuk kerja sama lainnya dalam rangka meningkatkan CBM ketiga negara ini.

4.5. Pembahasan

Dari data hasil penelitian yang telah peneliti kumpulkan dari berbagai sumber, peneliti akan membahas secara komprehensif berbagai temuan yang terkait dengan diplomasi pertahanan Indonesia dalam kerja sama trilateral aspek darat Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk mengatasi perompakan di Laut Sulu-Sulawesi. Pembahasan ini akan dilakukan dengan mengelaborasi data yang telah ditemukan dengan teori-teori yang akan peneliti gunakan dalam sub-bab berikut:

4.5.1. Kerja Sama Trilateral Aspek Darat Indonesia Malaysia Filipina

Permasalahan keamanan dan aksi kekerasan maritim di sekitar perairan Laut Sulu-Sulawesi pada dasarnya tidak akan terlepas dari permasalahan politik dan keamanan dalam negeri Filipina khususnya di bagian Filipina Selatan (Arifin, Ras, & Siswoyo, 2018, p. 18). Hal ini berawal dari krisis politik antara pemerintahan Filipina dengan kelompok *Moro National Liberation Front* (MNLF) yang meminta pemisahan dan kemerdekaan dari Filipina sehingga kelompok ini dilabeli sebagai kelompok pemberontak. Perompakan di Laut Sulu-Sulawesi ini mayoritas dilakukan oleh Abu Sayyaf Group yang memiliki tujuan untuk memerdekakan wilayah Filipina Selatan. Dalam rangka meraih keinginan mereka, mereka membutuhkan anggaran. Oleh karena itu mereka melakukan kejahatan lintas negara berupa perompakan di Laut Sulu-Sulawesi dan juga beberapa kejahatan lainnya seperti perdagangan senjata, narkoba, dan juga manusia. Berdasarkan data yang telah peneliti kumpulkan, perompakan yang terjadi di Laut Sulu Sulawesi ini dilakukan dengan pengurusan isi kapal dan juga penculikan

awak kapal dengan meminta tebusan. Kejahatan lintas negara ini merupakan salah satu cara mereka untuk mengumpulkan dana dalam rangka mencapai tujuan mereka.

4.5.1.1. Bentuk Kerja Sama Trilateral Aspek Darat

Kerja sama trilateral merupakan salah satu bentuk kerja sama internasional sebagai kesepakatan bahwa berbagai kepentingan, nilai, dan tujuan saling selaras dan dapat menghasilkan sesuatu, atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus. Kerja sama tersebut merupakan harapan suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membuat negara tersebut untuk mencapai kepentingannya. Dalam konsep kerja sama internasional, beberapa kondisi tertentu akan menempatkan kerja sama ini dilakukan dalam kerangka trilateral seperti yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Persoalan keamanan di Laut Sulu-Sulawesi tidak hanya berdampak kepada kepada satu atau dua negara, namun berdampak pada ketiga negara yang beririsan langsung dengan Laut Sulu-Sulawesi yaitu Indonesia, Malaysia, dan juga Filipina. Oleh karena itu dalam rangka mengatasi persoalan keamanan di Laut Sulu-Sulawesi, Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempatkan kerja sama dalam kerangka trilateral, bukan hanya bilateral. Hal ini sejalan dengan konsep kerja sama trilateral dimana terdapat kondisi tertentu yaitu gangguan keamanan di Laut Sulu-Sulawesi yang dapat mempengaruhi ketiga negara ini. Ketiga negara ini sejak dahulu telah memiliki kerja sama bilateral satu sama lain, namun dengan berkembangnya dinamika ancaman keamanan di Laut Sulu-Sulawesi yang berbatasan langsung dengan ketiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Filipina sepakat untuk menempatkan kerja sama ini dalam kerangka trilateral.

Kerja sama trilateral ini dikenal dengan *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) pada tahun 2016 yang meliputi Patroli Laut Terkoordinasi (*Coordinated Sea Patrol*), Patroli Udara (*Air Patrol*), Pertukaran Informasi dan Intelijen (*Information and Intelligent Sharing*) dan Latihan Darat Bersama (*Land*

Exercise). Keempat patroli tersebut merupakan kerja sama strategis yang merupakan suatu kesatuan sehingga tidak dapat dipisahkan perbagian atau fungsinya (Primayanti, Legionosuko, & Waluyo, 2020, p. 1). Patroli laut dan udara telah dilaksanakan pada tahun 2016 dan tahun 2017 oleh ketiga negara. Namun belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai kerja sama aspek darat. Dalam JWG TCA ke-6, Indonesia mengusulkan adanya latihan darat trilateral dan mendapatkan titik terang pada JWG ke 7 dimana ketiga Menteri Pertahanan sepakat untuk melaksanakan di akhir tahun 2018 hingga awal 2019 (Joanita, 2019, p. 79). Hal ini juga disampaikan oleh Menteri Pertahanan Indonesia Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu dalam pidatonya pada 2 Juni 2018 di Shang Ri-La Dialogue dimana ketiga negara ini akan meningkatkan kerja sama melalui Latihan Darat Bersama. Latihan darat ini merupakan lanjutan pelaksanaan TCA dan hadir untuk melengkapi patroli laut dan patroli udara yang telah dilaksanakan sebelumnya. Seiring dengan perkembangan lingkungan strategis di kawasan, maka Menteri Pertahanan ketiga negara sepakat untuk memperluas aspek kerja sama dalam bentuk Indomalphi Middle Land Exercise.

Pada tahun 2019, ketiga negara ini sepakat untuk menandatangani kerja sama trilateral aspek darat dalam Shang Ri-La Dialogue di Singapura pada tahun 2019. Kerja sama trilateral aspek darat ini dilakukan dalam bentuk Latihan Bersama Indomalphi Middle Land Exercise 2019 di Tarakan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang menyatakan bahwa selain TAP dan TMP, komponen ketiga TCA yaitu latihan darat bersama akhirnya dimulai pada 31 Juli 2019 (Ryacudu, 2020). Namun berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kasubdit Multilateral Kersin Kemhan, Kolonel (Inf) Kurniawan Firmuzi Syarifuddin, S.E yang menyatakan bahwa kerja sama aspek darat ini bukan merupakan bagian dari TCA namun latihan darat ini memang ada sebagai inisiatif politik yang dimiliki

oleh Menteri Pertahanan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan mengenai dasar kerja sama trilateral aspek darat ini.

Menurut Mayjen TNI Rizerius Eko Hadisancoko, latihan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama perbatasan diantara tiga negara dalam rangka menangkal aksi teroris serta kejahatan lintas negara lainnya, juga untuk berkontribusi pada perdamaian, keamanan, stabilitas dan kemajuan ekonomi di wilayah kawasan tiga Negara (Hermawan, 2019). Latihan bersama di Tarakan ini mengusung tema “Interoperabilitas Satuan TNI dengan Satuan Angkatan Bersenjata Malaysia dan Filipina dalam menghadapi kemungkinan terjadinya aksi terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya di wilayah yang berbatasan dengan perairan Laut Sulu dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan di kawasan”.

Berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan, kerja sama trilateral merupakan salah satu komponen dalam Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) yang meliputi komponen darat, laut, dan udara yang dilaksanakan dalam bentuk latihan darat bersama Indomalphi namun ketiga negara ini perlu melengkapi beberapa kebijakan seperti SOVFA dan SOP serta *guidelines* pelaksanaan kerja sama ini khususnya kerja sama trilateral aspek darat untuk mendukung keberlanjutan dan keberhasilan kerja sama ini. Ketiga negara ini telah melakukan berbagai upaya negosiasi untuk menyusun SOP dan *Guidelines* kerja sama trilateral namun hingga penelitian ini dilaksanaka, SOP dan *guidelines* ini masih belum terbentuk. Tantangannya terletak dalam proses negosiasi dan sejauh mana kepentingan ketiga negara ini bisa diakomodir dalam kerja sama ini.

Hal ini juga relevan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Luh Putu Ika Primayanti, Tri Legionosuko, dan Surryanto Djoko Waluyo pada tahun 2020 dengan judul “Trilateral Cooperation Arrangement sebagai Strategi Pertahanan Indonesia dalam Penanggulangan Ancaman Asimetris di Kawasan Asia Tenggara” yang menyatakan bahwa

TCA terdiri dari Patroli Laut Terkoordinasi (*Coordinated Sea Patrol*), Patroli Udara (*Air Patrol*), Pertukaran Informasi dan Intelijen (*Information and Intelligent Sharing*) dan Latihan Darat Bersama (*Land Exercise*) serta penelitian yang dilakukan oleh Ulfi Joanita dengan judul Implementasi Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) Indomalphi Sebagai Hasil dari Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Menanggulangi Ancaman Keamanan di Laut Sulu Periode 2016-Oktober 2018 yang menyatakan bahwa latihan darat bersama Indomalphi dibahas dalam JWG TCA ke-6, dan JWG ke 7 dimana ketiga Menteri Pertahanan sepakat untuk melaksanakan di akhir tahun 2018 hingga awal 2019.

4.5.1.2. Pelaksanaan Kerja Sama Trilateral Indomalphi dan Kendala

Kerja sama internasional merupakan harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membuat negara itu untuk mencapai kepentingannya. Persetujuan mencakup atas masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan. Persetujuan juga berisi aturan resmi maupun tak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan (Damasky, 2018, p. 18). Kerja sama trilateral aspek darat merupakan salah satu bentuk kebijakan yang diputuskan oleh ketiga negara untuk mencapai kepentingannya. Sesuai dengan penjabaran sebelumnya, kerja sama ini dilaksanakan dalam bentuk latihan darat bersama.

Latihan bersama ini berlangsung sejak tanggal 29 Juli 2019 hingga 8 Agustus 2019 dengan melibatkan 180 personil dan berlangsung selama 13 hari dengan materi Tembak Reaksi, Tembak Tepat, Pertempuran Jarak Dekat dengan Serbuan Pemukiman, Patroli Keamanan, Penembakan Sniper, dan Materi *Non Combatant Evacuation*. Terkait detail jumlah personel tidak dapat dijelaskan secara detail dalam tulisan ini karena data terkait detail jumlah personel ini merupakan sebuah data yang sifatnya *confidential*.

Latihan darat bersama ini dilaksanakan di Lapangan Sapta Marga Yonif Raider 613/RJA Tarakan, Kalimantan Utara. Pada latihan ini masing-masing negara akan bertukar pengetahuan dan pengalaman tentang berbagai hal yang berkaitan dengan taktik, teknik dan prosedur materi terkait pada sesi teori atau pengetahuan dan latihan praktek yang terkait dengan kontra terorisme (Kemhan RI, 2019). Latihan darat ini diikuti oleh Angkatan Darat ketiga negara, yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang diwakili oleh Batalyon Infanteri Raider 613/ Raja Alam, Observer Angkatan Darat Negara Malaysia, dan Observer Angkatan Darat Negara Filipina. Latihan bersama ini lahir sebagai wujud pencapaian kepentingan bersama ketiga negara ini di kawasan Laut Sulu-Sulawesi dimana masih terdapat berbagai isu-isu kepercayaan dan rasa saling curiga antara ketiga negara. Berikut dokumentasi pelaksanaan Indomalphi Middle Land Exercise di Tarakan, Kalimantan Utara:

Gambar 4.3.
Opening Ceremony Indomalphi Middle Land Exercise di Tarakan,
Kalimantan Utara Tahun 2019



Sumber: tni.mil.id

Namun dalam pelaksanaannya kerja sama ini masih memiliki beberapa hambatan. Yang pertama yaitu terkait kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh Filipina dalam kerja sama trilateral aspek darat. Juru bicara *Armed Force of*

the Philippines (AFP), Kolonel Restituto Padilla mengatakan bahwa konstitusi Filipina tidak mengizinkan keterlibatan pasukan militer negara lain untuk ikut beroperasi tanpa adanya perjanjian. Ketiga negara ini sudah memiliki perjanjian di bawah TCA. Untuk melaksanakan latihan darat atau melakukan operasi bersama di wilayah daratan dalam lanjutan upaya menjaga keamanan di Laut Sulu-Sulawesi, Filipina memiliki syarat diberlakukannya *Status of Visiting Forces Arrangement* atau biasa dikenal dengan kebijakan SOVFA. Dalam rapat koordinasi yang dilakukan oleh pihak Indonesia menyebutkan bahwa Filipina lebih siap untuk menyepakati adanya SOVFA karena Filipina sudah memiliki pengalaman menerima pasukan asing dalam jumlah besar. Sebaliknya pihak Indonesia belum memiliki pengalaman tersebut (Rahman, 2019, p. 5). *Trilateral Cooperative Arrangement* dipandang akan lebih maksimal hasilnya dengan dilaksanakannya kerja sama trilateral aspek darat namun perjanjian ini tidak kunjung ditandatangani. Dalam draft SOVFA terdapat pasal yang mengatur pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit akan diadili oleh *Host Country* serta beberapa pasal lain yang dipandang akan merugikan pihak Republik Indonesia (Rahman, 2019, p. 6).

Hingga saat penelitian ini dilaksanakan, kebijakan SOVFA antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina masih belum ditandatangani. Kerja sama trilateral Indomalphi ini tidak lepas dari kritikan. Menurut Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almashyari, kesepakatan trilateral ini kerap tidak jelas *juntrungannya* (BBC News, 2019). Menurut Abdul Kharis Almashyari, kerja sama seperti ini sering tidak ditindaklanjuti dengan kegiatan yang nyata, tapi paling tidak perjanjiannya sudah ada dan sudah ada payung hukum jika nantinya kerja sama ini dibutuhkan. Hal ini dipengaruhi dengan tidak disahkannya SOVFA antara ketiga negara ini sehingga pelaksanaan perjanjian menjadi kurang jelas. Kondisi ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adi Fadhilah Nurul Rahman pada tahun 2019 dengan judul

Memberantas Kejahatan Transnasional di Jalur Segitiga Asia Tenggara, Wilayah Perairan Laut Sulu yang menyatakan bahwa dalam kerja sama trilateral wilayah darat, Filipina memiliki syarat yaitu memberlakukan kebijakan *Status of Visiting Forces Arrangement* (SOVFA). Hal ini berpengaruh kepada belum adanya keberlanjutan pelaksanaan Latihan Darat Bersama Indomalphi. Dengan adanya SOVFA yang sudah disetujui oleh Kongres Filipina, kerja sama dapat dilaksanakan dengan jumlah personel yang besar dan juga berbagai peralatan yang mumpuni sehingga pelaksanaan kerja sama aspek darat menjadi lebih optimal.

Landasan dalam kerja sama ini masih belum jelas sehingga seluruh pihak yang terlibat belum memiliki pemahaman yang sama mengenai kerja sama ini. Hal ini ditunjukkan dengan pemahaman masing-masing instansi terhadap kerja sama ini dan keberlanjutan pelaksanaan latihan darat ini. Latihan darat ini baru dilaksanakan satu kali di tahun 2019 dan belum ada pembicaraan lebih lanjut mengenai pelaksanaan berikutnya. Landasan kerja sama yang kurang jelas menyebabkan latihan bersama ini sifatnya belum rutin dan tidak mengikat. Sementara harapan dari aspek darat dalam kerja sama trilateral ini ketiga negara bisa menjalankan operasi darat bersama. Hingga saat penelitian ini dilaksanakan, kerja sama aspek darat baru berbentuk latihan darat bersama dan belum sampai pada tahapan operasi. Selain itu, pandemi COVID-19 juga merupakan penyebab ketidakberlanjutan pelaksanaan latihan darat bersama ini. Dalam hal ini pihak Indonesia sendiri juga menunggu inisiatif dari dua negara lainnya untuk pelaksanaan kerja sama ini.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, latihan darat bersama pada tahun 2019 telah terlaksana dengan baik dari pembukaan hingga penutupan sesuai dengan yang direncanakan, namun masih ada beberapa poin yang belum terpenuhi. Yang pertama dari segi jumlah personel masih belum memenuhi jumlah yang diinginkan. Dengan alasan kerahasiaan, informan

tidak dapat menjelaskan dengan detail mengenai jumlah personel ini. Namun jika kebijakan SOVFA disetujui oleh Kongres Filipina, maka Filipina dapat mengirimkan personel dalam jumlah yang lebih besar untuk kerja sama ini. Yang kedua yaitu tujuan masih belum tercapai dalam satu kali latihan dimana para personel bisa *gathering* atau berkumpul bersama dan melupakan perbedaan-perbedaan yang ada. Diharapkan dalam latihan-latihan berikutnya ketiga negara ini bisa mengeliminasi berbagai perbedaan yang ada. Yang ketiga yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 sehingga latihan bersama ini belum bisa dilanjutkan, diperkirakan hingga 2022 masih belum bisa dilanjutkan. Harapannya dengan adanya inisiatif Indonesia dalam kerja sama ini, akan ada inisiatif lanjutan baik dari Malaysia maupun Filipina. Hingga saat ini pihak Indonesia hanya bisa memantau bagaimana kelanjutan kerja sama ini dalam beberapa tahun ke depan.

Kejelasan landasan kebijakan seperti kebijakan SOVFA dan SOP dalam kerja sama aspek darat Indomalphi dapat dikatakan masih kurang jelas karena kebijakan SOVFA yang tidak kunjung disahkan. Pelaksanaan latihan darat bersama Indomalphi ini dilandasi oleh rasa percaya dan sebagai bentuk Filipina menghargai inisiatif Indonesia (Syarifuddin, 2021). Namun demikian, pelaksanaan kerja sama luar negeri tetap membutuhkan landasan yang jelas serta kejelasan mengenai institusi yang mengorganisir pelaksanaan kerja sama ini sehingga pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan tepat sasaran. Dalam hal ini ketiga negara masih melakukan pembahasan SOP dan *guidelines* namun proses negosiasinya tergantung kepada kepentingan nasional masing-masing negara.

Kemudian berdasarkan informasi yang peneliti kumpulkan, selain latihan darat bersama, salah satu bentuk kerja sama yang berkaitan dengan aspek darat yang dilakukan yaitu *Port Visit* atau kunjungan pelabuhan. *Port Visit* ini dilaksanakan beriringan dengan *JWG on TCA*. Namun pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh gap yang terjadi antara Malaysia

dan Filipina. Misalnya dalam kegiatan *port visit* yang dilaksanakan di Filipina, Indonesia menghadiri kegiatan ini sementara Malaysia menghadiri namun tidak mau menepikan kapalnya karena ada kecurigaan-kecurigaan tertentu kepada Filipina. Indonesia sangat berperan sebagai penengah dalam hal ini dimana Indonesia selalu menghadiri kegiatan *Port Visit* di kedua negara ini dan Indonesia selalu mengajak kedua negara ini untuk hadir dalam *port visit* yang dilaksanakan di Indonesia.

Pelaksanaan kerja sama aspek darat sejauh ini masih dalam proses menuju tujuan yang diinginkan bersama. Terkait latihan bersama, dibutuhkan landasan kerja sama yang lebih jelas dan pengaturan SOP yang detail sehingga hasil dari kerja sama ini optimal. Permasalahan terkait kebijakan dalam kerja sama ini dapat menjadi hambatan untuk keberlanjutan pelaksanaan latihan darat bersama ini, padahal pada dasarnya latihan darat bersama ini merupakan sebuah kerja sama yang baik untuk membangun relasi psikologis antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang terikat sebuah kepentingan bersama di kawasan Laut Sulu-Sulawesi.

Berdasarkan penjabaran di dalam sub-bab ini, kerja sama trilateral aspek darat ini hadir untuk melengkapi kerja sama aspek lainnya yang telah dilakukan sebelumnya dalam rangka mengatasi perompakan di Laut Sulu-Sulawesi. Kerja sama ini dilakukan dalam bentuk latihan darat bersama dengan mengusung tema “Interoperabilitas Satuan TNI dengan Satuan Angkatan Bersenjata Malaysia dan Filipina dalam menghadapi kemungkinan terjadinya aksi terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya di wilayah yang berbatasan dengan perairan Laut Sulu dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan di kawasan”. Dalam mengatasi perompakan di Laut Sulu-Sulawesi, latihan darat bersama ini diimplementasikan dalam bentuk patroli terkoordinasi sehingga latihan darat ini fokus untuk meningkatkan profesionalisme yang dimiliki oleh pasukan khususnya di perbatasan Laut Sulu-Sulawesi dari ancaman kejahatan transnasional perompakan. Abu

Sayyaf Group dalam melakukan perompakan dan penculikan membawa sandera ke pulau-pulau yang terletak di sekitar Laut Sulu-Sulawesi. Dengan memperkuat penjagaan perbatasan, ketiga negara dapat mendeteksi aksi mencurigakan yang dilakukan oleh Abu Sayyaf Group dengan membawa sandera.

4.5.2. Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Kerja Sama Trilateral Aspek Darat Indonesia, Malaysia, dan Filipina

4.5.2.1 Collective National Interest dan Regional Security Complex

Kondisi ini berkaitan dengan teori *regional security complex* dimana ancaman keamanan yang sama akan menempatkan negara dalam satu komunitas keamanan. Morgenthau menyatakan bahwa mencapai kepentingan nasional bukan hanya kebutuhan politik tetapi juga merupakan sebuah kewajiban moral yang dituruti sebuah negara dalam berurusan dengan bangsa lain serta salah satu penuntun, standar pemikiran, serta aturan untuk bertindak (Glanville, 2005, p. 3). Dalam konsep kepentingan nasional, kondisi-kondisi lingkungan strategis yang terjadi baik di tingkat regional maupun global menyebabkan munculnya persoalan yang tidak hanya berdampak bagi satu negara. Di dalam situasi hubungan internasional saat ini yang penuh dengan dinamika, negara-negara akan berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja sama untuk memperoleh keuntungan tanpa mengorbankan pihak lain. Situasi interdependensi yang timbul akan mempererat kerja sama yang dimiliki oleh negara-negara di dunia. Dalam keadaan seperti ini, interdependensi mendorong masing-masing negara mengkalkulasi betul kemungkinan kerugian yang didapat jika mereka tidak melakukan kerja sama (Dugis, 2016, pp. 118-119). Ancaman muncul melewati batas-batas negara yang membutuhkan solusi bersama. Ancaman-ancaman ini menyebabkan negara-negara mempertimbangkan *collective interest* sebagai sebuah solusi karena hal ini tidak hanya berkaitan dengan kepentingan satu negara. *Collective interest* dapat membantu negara

menciptakan sebuah kerja sama yang kuat. Isu *collective interest* dan kepentingan nasional merupakan suatu hal yang rumit. Namun beberapa negara masih dapat mencapai kepentingan kolektif yang bertindak sebagai media untuk mencapai kepentingan nasional mereka.

Berkaitan dengan konsep kepentingan nasional ini, ancaman perompakan jika tidak segera dikelola akan menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan dan negara, mengancam nyawa pelaut, dan melumpuhkan aliran perdagangan global. Ketiga negara ini sepakat bahwa ancaman perompakan di laut, penyanderaan, dan kejahatan transnasional dapat menurunkan kepercayaan perdagangan, perniagaan, dan kepercayaan terhadap kawasan secara umum. Dampak yang ditimbulkan dari ancaman perompakan yang terjadi di kawasan Laut Sulu-Sulawesi ini menempatkan Indonesia, Malaysia, dan Filipina sebagai tiga negara yang berbatasan langsung dengan Laut Sulu-Sulawesi dalam suatu ancaman bersama sehingga ketiga negara ini terlibat dalam satu kepentingan bersama atau *collective interest*.

Ancaman perompakan di Laut Sulu-Sulawesi ini dapat mengancam kepentingan nasional masing-masing negara dan untuk mengatasinya kerja sama ini dilakukan dalam kerangka trilateral. Menurut Buku Putih Pertahanan tahun 2015, kepentingan nasional Indonesia adalah menjaga tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta terjaminnya kelancaran pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Kepentingan nasional diwujudkan dengan memperhatikan tiga kaidah pokok, yaitu Pertama, tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Kedua, pembangunan nasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berketahanan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara. Ketiga, mendayagunakan sarana, potensi dan kekuatan nasional secara menyeluruh dan terpadu (Kementerian Pertahanan RI, 2015, p. 26). Kondisi keamanan di Laut Sulu-Sulawesi akan mempengaruhi kepentingan nasional yang dimiliki oleh ketiga negara ini. Dari

pihak Indonesia, meskipun jarak perbatasan Indonesia tidak sedekat jarak perbatasan antara Malaysia dan Filipina, kejahatan ini tetap mengancam warga negara Indonesia yang melintas di kawasan tersebut, warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan, dan juga warga negara Indonesia yang berada di kawasan Sabah-Serawak dan juga Filipina Selatan. Begitupun dengan Malaysia yang mengalami kerugian ekonomi dimana kapalnya dikuras, terhambatnya sektor pariwisata, dan juga keamanan warga negaranya. Sementara bagi Filipina, ancaman ini juga berpengaruh kepada politik dalam negerinya dimana hasil dari kejahatan lintas negara ini akan digunakan untuk melawan pemerintah Filipina dan juga keamanan warga negaranya. Ancaman perompakan di Laut Sulu-Sulawesi ini dapat bermuara pada ancaman lainnya seperti terorisme, perdagangan senjata, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya. Selain itu, kejahatan perompakan di Laut Sulu-Sulawesi ini juga dapat menurunkan kepercayaan internasional kepada ketiga negara ini dan juga memberikan citra yang buruk bagi ketiga negara. Sebuah kondisi lingkungan strategis menempatkan Indonesia, Malaysia, dan Filipina di dalam sebuah kepentingan yang sama. Dalam hal ini Indonesia, Malaysia, dan Filipina memiliki kepentingan yang sama yaitu mengatasi gangguan keamanan di kawasan Laut Sulu-Sulawesi yang dilakukan oleh aktor non negara.

Hal ini juga sejalan dengan *Regional Security Complex Theory*. Menurut Barry Buzan dan Ole Waever, pendekatan keamanan pasca perang dingin memiliki karakter yang lebih kearah regional di mana keamanan regional terasa lebih otonom. *Regional Security Complex Theory* mengamati bagaimana terbentuknya suatu *regional security complex* sebagai kelanjutan dari suatu hubungan yang mempengaruhi satu sama lain akan terus berlanjut, seperti konflik yang sering terjadi akan dapat menyatukan beberapa negara dalam suatu komunitas keamanan. Keamanan suatu negara tidak dapat berdiri sendiri dan dipengaruhi oleh lingkungan strategisnya dan juga

keamanan negara lain di sekitarnya. Konteks keamanan saat ini juga berasal dari aktor-aktor non-negara. Perubahan dan perkembangan ancaman menandakan peran aktor-aktor non-negara yang semakin signifikan. Sesuai dengan Regional Security Complex Theory, keamanan masing-masing negara tidak dapat terlepas dari situasi keamanan negara lainnya. Kerja sama trilateral ini sejalan dengan konsep sekuritisasi dan desekuritisasi di mana kerja sama trilateral ini merupakan salah satu bentuk desekuritisasi melalui negosiasi-negosiasi yang dilakukan oleh ketiga negara dan dalam situasi darurat, ketika ancaman terdeteksi ketiga negara akan mengambil tindakan cepat dengan berkoordinasi melalui MCC dan masing-masing negara berjaga di perbatasan.

Masalah keamanan di Laut Sulu-Sulawesi menyebabkan Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda menjadi satu dalam suatu kepentingan bersama yaitu mengatasi ancaman perompakan di Laut Sulu-Sulawesi yang dilakukan oleh aktor non negara. Gangguan keamanan di kawasan Laut Sulu-Sulawesi dapat mengganggu keamanan masing-masing negara sehingga ketiga negara ini memiliki kepentingan yang sama dan juga dalam rangka melindungi kepentingan nasionalnya masing-masing. Kejahatan ini dapat menjadi ancaman bagi politik dalam negeri Filipina, aksi di kawasan ini juga dapat membahayakan wilayah Malaysia yang berbatasan langsung dengan Filipina Selatan dan bagi Indonesia ancaman ini mengancam keselamatan warga negara Indonesia. Meskipun masing-masing negara memiliki persoalan sendiri, ketiga negara ini mengalami gangguan terhadap kondisi keamanan di Laut Sulu-Sulawesi yang pada akhirnya menyatukan ketiga negara dalam satu kepentingan dan diwujudkan dalam berbagai bentuk kerja sama trilateral Indomalphi. Terdapat pergeseran konteks keamanan yang melibatkan aktor-aktor non negara yang cukup signifikan. Saat ini ketiga negara tidak berhadapan satu sama lain ataupun dengan negara lain, namun dengan

aktor-aktor non negara yang asimetris. Terkait ancaman perompakan di Laut Sulu-Sulawesi ini, ketiga negara ini menjadi tidak aman. Hal ini sejalan dengan konsep *collective interest* dimana ketiga negara ini memiliki satu kepentingan bersama yaitu mengatasi perompakan di Laut Sulu-Sulawesi dan juga melalui kepentingan bersama ini ketiga negara bisa memenuhi kepentingan nasionalnya.

4.5.2.2. Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Kerja Sama Trilateral Aspek Darat Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk Mengatasi Perompakan di Laut Sulu-Sulawesi

Diplomasi pertahanan dibutuhkan untuk mengatasi ancaman yang kompleks dan sulit diprediksi, instabilitas regional dan ketegangan dalam ketidakamanan global. Kerangka perjanjian dan komitmen militer akan menjadi elemen penting dalam menahan dan menghindari krisis (Matthews & Treddenick, 2001, p. 42). Dalam penyelenggaraan diplomasi pertahanan, Indonesia harus mampu menentukan kebijakan luar negeri di bidang pertahanan, bukan hanya sekedar dengan siapa berdiplomasi, tetapi juga apa yang menjadi *scope*, bagaimana melakukannya, mengapa, dan kapan waktu untuk melakukan diplomasi karena diplomasi merupakan pilar penting dalam mencapai tujuan kebijakan luar negeri negara (Supriyatno, 2014, p. 156). Kerja sama trilateral aspek darat Indonesia, Malaysia, dan Filipina merupakan sebuah bentuk diplomasi pertahanan Indonesia dalam mengatasi ancaman transnasional perompakan di Laut Sulu-Sulawesi. Menurut Idil Syawfi (2009) dalam Multazam (2010), terdapat karakter utama dari diplomasi pertahanan suatu negara (Multazam, 2010, p. 18)

1. Defense Diplomacy for Confidence Building Measure

CBM didefinisikan sebagai tindakan formal dan informal baik unilateral, bilateral, dan multilateral yang membahas, mencegah, atau menyelesaikan ketidakpastian di antara negara-negara termasuk elemen militer dan politik (Baviera, 2001, p. 10). CBM sendiri merupakan sebuah

prosedur yang digunakan untuk mencegah permusuhan, mencegah eskalasi, mengurangi ketegangan militer, dan membangun rasa saling percaya antar negara. Pakar pertahanan menilai kerja sama aspek darat yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina merupakan sebuah bentuk kerja sama untuk mengembangkan rasa saling percaya antara ketiga negara, bukan merupakan sebuah solusi khusus menindak dan mencegah terorisme di kawasan Laut Sulu-Sulawesi. Menurut salah satu pengamat pertahanan, Mufti Makarim, perjanjian militer antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina ini lebih ditujukan kepada penguat relasi psikologis antar negara karena perjanjian yang selama ini dibuat tidak pernah memberi kesempatan bagi militer negara lain untuk turut menumpas terorisme di dalam negeri (BBC News, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama trilateral aspek darat Indonesia, Malaysia, dan Filipina ini merupakan sebuah kerja sama yang dibangun dalam rangka membangun *confidence building measure* yang dimiliki oleh ketiga negara ini. Dalam hal ini masih terdapat *trust issue* dari ketiga negara ini. Indonesia kurang yakin dengan operasi militer Filipina karena Abu Sayyaf terus eksis, sementara Filipina menganggap Malaysia tidak proaktif karena militan Filipina memiliki jaringan dengan kelompok di utara Malaysia. Sehingga perjanjian ini merupakan salah satu upaya diplomasi pertahanan untuk saling cek sehingga rasa saling percaya bisa tumbuh. Hal ini berkaitan dengan salah satu bagian diplomasi pertahanan yaitu membangun *mutual trust* antar negara atau peningkatan *confidence building measure* (CBM).

Hal ini sejalan dengan pernyataan Kasubdit Multilateral Ditkersinhan, Kolonel (Inf) Kurniawan Firmuzi, S.E yang menyatakan bahwa masih terdapat gap khususnya antara Malaysia dan Filipina yang dilatarbelakangi oleh faktor sejarah terkait wilayah Kesultanan Sulu dan wilayah Sabah dan Sarawak. Gap ini merupakan sebuah hambatan untuk membangun CBM dari Malaysia dan Filipina. Dalam kerja sama trilateral

ini, Indonesia dapat dikatakan sebagai penengah antara kedua negara ini. Namun berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh perwakilan bidang pertahanan Kedutaan Besar Malaysia, beliau menyatakan bahwa Malaysia dan Filipina sejauh ini dekat, bahkan Indonesia yang kurang terbuka dalam kerja sama ini. Oleh karena itu Indonesia menginisiasi adanya latihan darat bersama untuk melengkapi komponen TCA.

Faktor sejarah yang dimiliki oleh ketiga negara juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan kerja sama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Dalam kerja sama aspek darat, Indonesia berperan sebagai inisiator dan sebagai *big brother* yang berupaya menyatukan dua negara lainnya dalam satu komunitas keamanan. Faktor latar belakang sejarah ini dapat menyebabkan timbulnya kecurigaan-kecurigaan yang sulit dilepaskan antar negara ini. Menurut Baviera, terdapat tujuh indikator CBM dan berikut analisis indikator CBM menurut Baviera dalam kerja sama trilateral aspek darat Indonesia, Malaysia, dan Filipina:

a. Communications

Indikator pertama dalam CBM menurut Baviera yaitu *communication*. Baviera menjelaskan beberapa bentuk komunikasi dalam CBM ini. Bentuk komunikasi yang dilakukan secara multilateral yaitu dalam bentuk *track two dialogue*. *Track two dialogue* merupakan sebuah upaya diplomasi yang dilakukan melalui jalur non pemerintah. Salah satu bentuk *track two dialogue* yang dilakukan oleh Indonesia yaitu upaya diplomasi kepada Abu Sayyaf Group pada tahun 2016. Ketika menyelamatkan sandera Abu Sayyaf Group, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menggunakan cara damai melalui diplomasi dengan kelompok Abu Sayyaf. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia tidak mau memberikan uang tebusan karena uang tersebut akan digunakan untuk mendirikan negara Islam dan untuk melindungi

warga negara Indonesia, Pemerintah Indonesia meminta tolong kepada Yayasan Sukma Bangsa yang didirikan oleh Surya Paloh dan kemudian mengutus beberapa orang untuk melakukan pendekatan dan negosiasi dengan Kelompok Abu Sayyaf (Primayanti, Legionosuko, & Waluyo, 2020). Dapat dilihat bahwa *track two dialogue* ini dilakukan ketika adanya kejadian perompakan dan penculikan awak kapal di Laut Sulu-Sulawesi Sementara untuk komunikasi rutin yang dilakukan oleh ketiga negara ini satu sama lain, ketiga negara fokus melakukan *track one dialogue*. Hal ini dapat dilihat hasil wawancara dengan Kemhan RI, Kedutaan Besar Malaysia, dan Kedutaan Besar Filipina di mana ketiga negara ini melakukan komunikasi hanya melalui *Join Working Group on Trilateral Cooperative Arrangement (JWG on TCA)*, forum-forum ASEAN, dan juga *platform* komunikasi umum ketiga negara ini seperti MCC di mana saluran komunikasi ini disetujui oleh ketiga negara. Dengan alasan kerahasiaan, informan tidak dapat menjelaskan dengan detail mengenai *platform* komunikasi ini. *Platform* komunikasi ini bentuknya radio atau *channel* yang hanya bisa diakses oleh ketiga negara ini dan dengan platform ini terdapat satu titik informasi. Pembentukan *platform* ini membutuhkan proses yang panjang dalam berbagai pertemuan *JWG on TCA* untuk saling yakin. Kerja sama aspek darat secara spesifik dibahas sejak pertemuan *JWG on TCA* ke 6 dan 7 hingga dilaksanakan latihan darat bersama pada tahun 2019 di Tarakan.

Indomalphi tidak bersifat aliansi sehingga sulit bagi ketiga negara ini jika tidak memiliki *platform* komunikasi umum. Ketiga negara juga memiliki sarana komunikasi Maritime Command Center (MCC) yang terletak di Tarakan untuk Indonesia, Tawi-Tawi untuk Filipina, dan di Tawau untuk Malaysia. Namun selain itu peneliti juga menemukan informasi bahwa masih terdapat persoalan komunikasi dalam kerja

sama ini terutama di dalam MCC. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan, respon antar negara dalam MCC ini cukup lambat dimana seharusnya MCC menjadi sebuah wadah komunikasi untuk mengatasi ancaman secara cepat. Hal ini ditunjukkan dengan informasi yang disampaikan oleh pihak Malaysia bahwa ketika ada kapal mencurigakan, tidak ada yang merespon dari saluran MCC. Kondisi ini menyebabkan banyaknya keterlambatan dalam penanganan ancaman di Laut Sulu-Sulawesi.

Dalam komunikasi ketiga negara ini memiliki komunikasi yang berbeda dengan yang ditemukan dalam bilateral dan juga multilateral. Dalam bilateral negara melakukan komunikasi antara dua negara saja, sementara dalam multilateral negara melakukan *track two dialogue*. Dalam kerja sama ini ada *track two dialogue* yang telah dilakukan yaitu antara Indonesia dengan Abu Sayyaf Group ketika terjadi perompakan dan penculikan awak kapal di Laut Sulu-Sulawesi. Kemudian sarana komunikasi yang dilakukan berada di dalam *track one dialogue* di mana komunikasi yang dilakukan yaitu komunikasi antar aktor pemerintah. Namun *track one dialogue* dalam kerja sama ini dilakukan oleh tiga negara, tidak seperti bilateral yang dilakukan oleh dua negara. Hal ini dapat dilihat dari pihak-pihak yang menghadiri *JWG on TCA* ini berasal dari aktor-aktor pemerintah seperti Kementerian Pertahanan ketiga negara, Kementerian Luar Negeri, Markas Besar TNI, dan Kemenkopolhukam (Kemhan RI, 2021). Tiga negara ini bukan bersifat aliansi sehingga ketiga negara memiliki sebuah *platform* komunikasi yang hanya dapat diakses secara umum oleh ketiga negara. Dapat dilihat bahwa Indomalphi sendiri sudah memiliki berbagai saluran komunikasi satu sama lain namun penggunaannya masih belum optimal.

b. Transparency

Indikator kedua yang dijelaskan oleh Baviera yaitu *transparency*. Salah satu bentuk indikator ini yaitu adanya *common outline for defense publication*. Salah satu bentuk yang dilakukan oleh ketiga negara ini yaitu adanya *joint statement* ketiga negara ini. *Joint statement* ketiga negara ini muncul pada tahun 2016 untuk menjawab tantangan keamanan tiga negara di Laut Sulu-Sulawesi. Ketiga negara menyelenggarakan serangkaian pertemuan tingkat tinggi dan mengeluarkan pernyataan bersama mengenai masalah keamanan di Laut Sulu-Sulawesi. Ketiga negara sepakat bahwa ancaman perompakan di laut, penyanderaan, dan kejahatan transnasional dapat menurunkan kepercayaan perdagangan, perniagaan, dan kepercayaan terhadap kawasan secara umum (Roza, 2018). Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan pihak Kemhan RI, Kedutaan Besar Malaysia, dan Kedutaan Besar Filipina yang menyatakan bahwa ketiga negara memiliki pandangan dan tujuan yang sama untuk mengatasi perompakan di Laut Sulu-Sulawesi, namun untuk aksinya perlu lebih disinkronkan dengan peningkatan kepercayaan satu sama lain.

Namun masih terdapat kendala dimana ada beberapa hal yang masih ditutupi oleh ketiga negara ini. Filipina sudah mulai terbuka mengenai persoalan-persoalan di laut namun masih belum seutuhnya. Begitupun dengan persoalan sumber daya yang dimiliki dimana ketiga negara ini masih saling tertutup. Hal ini juga masih berkaitan dengan rasa saling curiga yang dimiliki oleh ketiga negara. Sejalan dengan *platform* komunikasi yang dibentuk oleh ketiga negara ini, dengan adanya *platform* ini terdapat *information sharing* yang transparan antara ketiga negara ini. *Platform* ini bersifat umum bagi ketiga negara sehingga ketiga negara ini bisa mengakses berbagai informasi terkait

pelaksanaan kerja sama trilateral. *Platform* ini dapat membantu ketiga negara agar tidak perlu saling memantau dan memiliki kecurigaan satu sama lain karena adanya keterbukaan informasi antara ketiga negara. Terkait transparansi, dalam kerja sama trilateral ketiga negara ini juga melakukan berbagai kerja sama intelijen atau *intelligent sharing*.

Selain itu terkait publikasi buku putih yang merupakan salah satu bentuk *defense publication*. Indonesia melakukan publikasi Buku Putih Pertahanannya. Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015, Indonesia konsisten dalam penanganan terhadap perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, perompakan laut, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, kejahatan perbankan internasional dan kejahatan siber (Kementerian Pertahanan RI, 2015). Malaysia dan Filipina tidak mempublikasikan buku putihnya secara keseluruhan namun Malaysia mengungkapkan isi Buku Putih Pertahanan Malaysia dalam diskusi Perwira Dialogue 2020 yang digelar oleh Institut Pertahanan dan Keamanan Malaysia (MiDAS) di Kuala Lumpur. Dalam Buku Putih tersebut Malaysia memaparkan pentingnya fokus pada penanganan masalah keamanan non tradisional seperti terorisme, pembajakan dan keamanan maritim, kejahatan dan keamanan dunia maya, dan kejahatan transnasional serta menerapkan teknologi modern untuk pertahanan (Nupus, 2020). Sementara Filipina memiliki Buku Putih Pertahanan namun Buku Putih Filipina ini tidak dipublikasikan secara luas, namun Filipina menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi ancaman kejahatan transnasional melalui *Philippine Center of Transnational Crime (PCTC)* yang menyatakan bahwa kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang berdimensi internasional sehingga menjadi perhatian setidaknya dua negara yang terkena dampak dan harus diatasi bersama (PCTC, 2022) Kemudian terkait transparansi juga dapat

dilihat dari kunjungan kamp militer. Malaysia sendiri sudah mengajak Filipina untuk melakukan kunjungan ke kamp militer Malaysia dan juga melakukan patroli menggunakan peralatan Malaysia namun hingga saat penelitian dilaksanakan, Indonesia belum melakukan hal ini. Meskipun ketiga negara telah mengeluarkan *joint statement*, masih terdapat persoalan-persoalan terkait transparansi ketiga negara ini.

c. Consultation

Dalam pelaksanaan *Trilateral Cooperative Arrangement*, setiap tahun Indonesia, Malaysia, dan Filipina mengadakan Indomalphi Joint Working Group on Trilateral Cooperative Arrangement (JWG on TCA). Tahun 2021 ini, telah dilaksanakan JWG on TCA yang ke-15 secara daring pada tanggal 13-14 Juli 2021. Pertemuan JWG on TCA ini membahas implementasi dan operasionalisasi kerangka kerja sama TCA antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam bentuk langkah-langkah mengatasi masalah keamanan di daerah maritim yang menjadi perhatian bersama (Kemhan RI, 2021). Dalam pertemuan ini, ketiga negara juga membahas mengenai *Standard Operational Procedures* dan juga *Operating Guidelines*. *JWG on TCA* dapat menjadi forum konsultasi yang dimiliki oleh ketiga negara untuk membahas persoalan kerja sama trilateral dalam mengatasi ancaman transnasional di Laut Sulu-Sulawesi. Selain itu forum-forum lain seperti *Eyes in the Sky* juga dapat menjadi salah satu wadah bagi ketiga negara ini membahas persoalan keamanan di Laut Sulu-Sulawesi. Kemudian ada forum-forum seperti Shang Ri-La Dialogue dimana Indonesia, Malaysia, dan Filipina menyepakati kerja sama aspek darat dalam bentuk latihan darat bersama pada tahun 2019.

d. Good Will

Ketiga negara sepakat bahwa ancaman perompakan di laut, penyanderaan, dan kejahatan transnasional dapat menurunkan

kepercayaan perdagangan, perniagaan, dan kepercayaan terhadap kawasan secara umum. Hal ini terlihat juga dalam JWG on TCA, ketiga negara ini berkomitmen untuk terus melanjutkan kerja sama di bawah kerangka TCA di *Maritime Areas of Common Concern* meskipun banyak hambatan dikarenakan Pandemi COVID-19. Dirkersinhan menyatakan bahwa kelompok teroris akan terus berevolusi dan beradaptasi serta menggunakan kemajuan teknologi untuk kepentingan kelompok mereka. Dirkersinhan juga menekankan pentingnya menanggulangi terorisme secara multidimensional, komprehensif dan berimbang antara pendekatan keras dan lembut (Kemhan RI, 2021). Hal ini juga ditunjukkan dengan adanya keinginan ketiga negara ini untuk mengembangkan kerja sama yang dimiliki melalui kerja sama aspek darat. Latihan darat ini merupakan sebuah bentuk kerja sama yang diinisiasi oleh Indonesia untuk menjalin relasi psikologis antara ketiga negara dan juga memberikan *deterrence effect* bagi ketiga negara. Dengan adanya kerja sama trilateral ini terlihat bahwa ketiga negara ini sudah memiliki *good will* untuk mengatasi ancaman transnasional di Laut Sulu-Sulawesi dan masih dilihat bagaimana pelaksanaan kerja sama ini di masa depan.

Namun masih terdapat persoalan terkait hal ini dimana belum ada SOP dan aturan main yang jelas bagi ketiga negara ini untuk melaksanakan kerja sama ini. Ketiga negara ini membahas mengenai SOP pelaksanaan kerja sama trilateral ini dalam forum *JWG on TCA* namun hingga saat penelitian ini dilaksanakan, hal tersebut masih di dalam tahapan pembahasan. Belum adanya kejelasan SOP dan *guidelines* ini menyebabkan adanya pemahaman dan pandangan yang berbeda-beda dalam kerja sama ini terutama yang terkait dengan aspek darat. Terkait hal ini juga terdapat *good will* yang dimiliki oleh ketiga negara dimana Indonesia dan Malaysia masih menghormati

syarat yang diajukan oleh Filipina sementara Filipina menghargai inisiasi dari Indonesia untuk melaksanakan kerja sama trilateral aspek darat Indomalphi.

e. Constraints

Indikator ini meliputi *disarmament and demilitarization agreements*. Dalam kerja sama ini, ketiga negara melakukan kerja sama untuk mengatasi ancaman di Laut Sulu-Sulawesi dan untuk meningkatkan kapasitas militer masing-masing negara. Hingga saat pelaksanaan penelitian, ketiga negara ini tidak melakukan perjanjian pelucutan senjata dan demiliterisasi. Ketiga negara ini hanya akan menyusun Standar Operasional Prosedur pelaksanaan operasi trilateral dalam mengajasi ancaman transnasional di kawasan Laut Sulu-Sulawesi. Dengan adanya latihan darat bersama, ketiga negara ini bisa mengetahui kondisi kekuatan militer dan meningkatkan kepercayaan bahwa masing-masing negara tidak akan melakukan invansi satu sama lain.

2. Defense Diplomacy for Capacity Building

Diplomasi pertahanan untuk kapabilitas pertahanan dilakukan dalam rangka memperkuat kapabilitas pertahanan secara material seperti alutsista dan komponen pertahanan lain. Berikut kekuatan militer negara negara di kawasan Asia Tenggara tahun 2021 menurut Global Fire Power

Tabel 4.1.
Kekuatan Militer Asia Tenggara Menurut Global Fire Power 2021

No	Negara	Power Index
1.	Indonesia	0.2684
2.	Vietnam	0.4189
3.	Thailand	0.4427
4.	Myanmar	0.6521
5.	Singapura	0.6931
6.	Malaysia	0.7451
7.	<i>Filipina</i>	<i>0.8219</i>
8.	Kamboja	2.2751
9.	Laos	3.3003

Sumber: Global Fire Power 2021

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kekuatan militer paling besar di kawasan Asia Tenggara. Dalam kerja sama trilateral Indomalphi, Indonesia berada di urutan pertama terkait kekuatan militer, dan diikuti oleh Malaysia lalu Filipina. Dari segi kekuatan militer, Filipina merupakan yang paling kecil di antara negara-negara Indomalphi. Salah satu faktor penyebabnya yaitu Filipina memiliki banyak masalah lain yang membutuhkan kekuatan militer besar sehingga cukup sulit bagi Filipinan untuk memfokuskan kekuatan militernya di kawasan Laut Sulu-Sulawesi. Indonesia sendiri memiliki kekuatan yang cukup besar namun masih belum optimal untuk mengamankan kawasan Laut Sulu-Sulawesi seutuhnya. Sementara berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan, Malaysia akhir-akhir ini mulai memperkuat militernya di kawasan Laut Sulu-Sulawesi.

Terkait dengan diplomasi pertahanan untuk peningkatan kapasitas, peningkatan kemampuan pertahanan perlu dilakukan untuk menghadapi berbagai ancaman yang akan muncul terhadap suatu negara. Diplomasi pertahanan terkait kapabilitas pertahanan ini dilakukan untuk memperkuat kapabilitas pertahanan dalam menghadapi ancaman tradisional dan non-tradisional. Peningkatan kapasitas ini dipandang sebagai sebuah elemen

yang penting jika peningkatan kapasitas militer dilakukan berkelanjutan dan terpusat kepada manusia. Kerja sama trilateral aspek darat Indomalphi dilakukan dalam bentuk latihan darat bersama yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas militer khususnya angkatan darat. Kegiatan latihan darat bersama ini sangat penting untuk melatih keterampilan, kesiapsiagaan, dan komunikasi antara pasukan darat dalam menghadapi bahaya teroris. Latihan darat yang diikuti oleh pasukan darat ketiga negara ini akan dapat terus berkembang dalam meningkatkan profesionalisme dan koordinasi guna menghadapi ancaman bersama. Menurut Rizerius Eko, implementasi dari latihan darat ini adalah patroli terkoordinasi sehingga pasukan ketiga negara memiliki profesionalisme yang sama (M.Ghofar, 2019). Untuk mengatasi masalah keamanan di Laut Sulu-Sulawesi, ketiga negara ini akan lebih kuat jika bekerja sama satu sama lain.

Kerja sama trilateral aspek darat ini dapat membantu ketiga negara untuk meningkatkan kapabilitas militer ketiga negara ini sehingga ketiga negara memiliki kekuatan yangimbang dalam menghadapi ancaman perompakan di Laut Sulu-Sulawesi. Saat ini ketiga negara tidak berhadapan dengan aktor negara ataupun saling berhadapan satu sama lain. Oleh karena itu penting bagi ketiga negara untuk memiliki kapabilitas militer yangimbang dalam menghadapi ancaman ini. Kerja sama ini dapat menjadi salah satu upaya bagi ketiga negara untuk meningkatkan kapabilitas militernya dan dapat saling belajar satu sama lain. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara, kerja sama ini juga mampu memberikan *deterrence effect* bagi ketiga negara ini. Namun hal ini juga kembali lagi kepada sejauh mana ketiga negara ini dapat mempercayai satu sama lain.

Berdasarkan penjabaran dalam sub-bab ini, kerja sama trilateral aspek darat ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh ketiga negara ini

untuk meningkatkan *confidence building measure* dan *capacity building* ketiga negara. Melalui latihan darat bersama ini, ketiga negara mengetahui kekuatan masing-masing dan menyusun aturan bersama sehingga rasa kepercayaan ketiga negara ini semakin meningkat. Latihan bersama juga dilakukan agar ketiga negara bisa belajar satu sama lain untuk meningkatkan kapasitas militernya. Meskipun masih terdapat kendala-kendala, kerja sama ini dapat menjadi kekuatan bagi ketiga negara untuk mengatasi ancaman perompakan di Laut Sulu Sulawesi

Pada dasarnya, kerja sama trilateral aspek darat Indonesia, Malaysia, dan Filipina merupakan sebuah peningkatan kerja sama yang dimiliki oleh ketiga negara untuk mengatasi ancaman perompakan di Laut Sulu-Sulawesi. Menurut Murphy (2008), *piracy is a land-based crime*. Perompakan memiliki tujuannya sendiri dari kapal-kapal yang dirampok. Hal ini menjelaskan bahwa perompakan yang terjadi di laut tidak dapat dilepaskan dari aspek darat. Hal ini mengarah kepada bagaimana mengembangkan, meningkatkan, dan menerapkan peraturan baru jika aktor-aktor seperti pemerintah, kapal dan pelaut, militer, swasta serta lembaga lainnya terlibat dalam penciptaan ketidakpastian di laut (Kyrychenko, 2018, p. 2). Hal ini menegaskan bahwa persoalan-persoalan yang terjadi di laut tidak dapat dilepaskan dari aspek darat. Kerja sama trilateral aspek darat ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan rasa saling percaya dan hubungan ketiga negara ini dalam kerja sama trilateral serta memberikan *deterrence effect* bagi ketiga negara dalam mengatasi perompakan di Laut Sulu-Sulawesi.

Berdasarkan penjelasan dalam bab Pembahasan, kerja sama trilateral aspek darat ini telah dilaksanakan dalam bentuk latihan darat bersama pada tahun 2019. Mengenai pelaksanaan kerja sama ini masih terdapat beberapa kendala terkait personel dan aturan pelaksanaannya, namun kerja sama ini dapat meningkatkan *confidence building measure* ketiga negara. Dalam mengatasi perompakan di Laut Sulu-Sulawesi, kerja sama trilateral

aspek darat ini mendukung keberhasilan pelaksanaan kerja sama aspek lainnya dimana dalam kerja sama ini ketiga negara ditujukan memiliki rasa kepercayaan yang tinggi dan dapat memperkuat kerja sama ketiga negara ini. Peningkatan rasa percaya dan adanya kepentingan bersama ketiga negara di kawasan Laut Sulu-Sulawesi menjadi modal yang kuat bagi ketiga negara dalam mengatasi ancaman perompakan di Laut Sulu-Sulawesi. Kerja sama ini mendukung peningkatan profesionalisme pasukan ketiga negara sehingga hal ini membantu ketiga negara ketika terjadi gangguan keamanan khususnya di wilayah perbatasan. Oleh karena itu penting bagi Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk meningkatkan upaya-upaya diplomasi pertahanan agar perompakan di Laut Sulu-Sulawesi dapat ditekan.